

# APLIKASI ADMINISTRASI

## Media Analisa Masalah Administrasi

### **Implementasi Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan dan Tak Takut Kepanasan) Guna Merahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya**

Novia Nilam Sari, Indah Murti, Dida Rahmadanik

### **Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China**

Aprilia Dwi Rasdiyanti, Suyeno

### **Efektivitas Program *Inaportnet* dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Kota Surabaya**

Syafira Dyah Anggaraini, Lunariana Lubis

### **Pengaruh Hardskill dan Softskill Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Solindo Tama Jaya**

Erika Febriari Saputri, Moeheriono, Winarto

### **Kemitraan Pemerintah dan Swasta Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Tenaga Listrik dengan Program *Zero waste City* di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/Pltsa Benowo, Kota Surabaya**

Borhanudin Achmad Safi, Mas Roro Lilik Ekowanti

### **Penilaian Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Menggunakan Risk Based Capital**

Nurul Nabila Batin, Sri Hartati Setyowarni, Herman

### **Koordinasi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya**

Intan Priska Wardani, Sasmito Jati Utama

### **Pengaruh Downward Communication dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Pengembangan Outlet Kantor Pos Cabang Utama Surabaya**

Galuh Noviani, Sri Umiyati, Setya Prihatiningtyas

## **JURNAL APLIKASI ADMINISTRASI MEDIA ANALISA MASALAH ADMINISTRASI**

Terbit dua kali dalam satu tahun pada Bulan Mei dan Desember. Berisi hasil penelitian, analisis kritis konsep dan tinjauan buku dalam bidang Administrasi Publik, Administrasi Bisnis, dan Ilmu-Ilmu Sosial

### **Pelindung**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

### **EDITORIAL TEAM**

#### **Editor in chief**

Dewi casmiwati (SCOPUS ID: 57224510545)

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

#### **Managing Editor**

Elli setiyo wahyuni (SINTA ID: 6148208)

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

#### **IT & Website Support**

Muhammad Syarifudin

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

#### **Administration**

Chaliem Mubayanah

Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

#### **Diterbitkan oleh**

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

#### **Alamat Redaksi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

Gedung Pulau Bras Lantai 1 Ruang MAP


Jl. Arif Rahman Hakim No.150, Surabaya - 60111

#### **Website**

<https://jaa.hangtuah.ac.id/>

#### **Email**

Jaa.journal@hangtuah.ac.id



**Editor in board:**

Agus Subianto (SCOPUS ID: 57217912018)  
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Sri Umiyati (SINTA ID: 6654316)  
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Budi Rianto (SINTA ID: 6111890)  
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Arfah (SINTA ID: 5989045)  
Faculty of social and political sciences, Universitas Hang Tuah, Indonesia

Agustinus Subarsono (SINTA ID: 6039246)  
Faculty of social and political sciences, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

**Reviewer:**


Indra Kertati (SINTA ID: 6121850)  
Universitas 17 Agustus Semarang

V. Rudy Handoko (SINTA ID: 6000096)  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sulistyanto (SCOPUS ID: 57221332065)  
Universitas Hang Tuah

Abdurrahman (SINTA ID: 6029143)  
Universitas Madura

Dian Ferriswara (SINTA ID: 6736310)  
Universitas Dr. Soetomo



## Implementasi Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujanan dan Tak Takut Kepanasan) Guna Merahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya

Novia Nilam Sari<sup>1</sup>, Indah Murti<sup>2</sup>, Dida Rahmadanik<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Program Studi Administrasi Publik  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author: [didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

### Abstract

*Rehabilitating uninhabitable houses that are still scattered in the city of Surabaya by looking at what things often happen when the program is running well. from program implementers to beneficiaries who in this program work together in the implementation process. This research is descriptive qualitative research. The subjects of this study were the head of the rehabilitation section for uninhabitable houses, hot tofu program assistants in the field, and beneficiaries of the hot tofu program. The research instrument is the researcher himself. Data collection techniques are interview techniques, observation, and documentation. The data analysis technique used is the interactive analysis technique. The theory used in this study uses the opinion put forward by Van Meter Van Horn, which consists of six variables, namely policy size, and objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes of implementers, inter-organizational communication and the socio-political environment. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the Hot Tofu program in rehabilitating uninhabitable houses in the city of Surabaya is going well even though there are several problems, namely, regarding human resources and material resources or materials used for building houses, this is what finally slowing down the development process so that it is often not in accordance with the scheduled time.*

**Keywords:** Implementation, Tahu Panas Program, Rehabilitation

### I. Pendahuluan

Memiliki rumah layak huni merupakan hak pemenuhan dasar yang wajib di miliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dengan bunyi bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Oleh sebab itu, setiap rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memiliki rumah yang layak, karena rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, serta sebagai upaya dalam peningkatan taraf hidup. Hal ini yang menjadi cita-cita pemerintah untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga masyarakat bisa meningkatkan keadaan hidup yang lebih sehat dan aman. Dimana rumah sendiri merupakan tempat untuk berlindung dari perubahan iklim maupun makhluk hidup lain yang berpotensi merugikan bagi penghuninya. Kelayakan sebuah rumah dapat mencerminkan kualitas hidup masyarakat, oleh karena itu ketidaklayakan sebuah hunian bisa menunjukkan bahwasanya masyarakat yang menempatnya masih di garis kemiskinan atau belum sejahtera.

Melihat permasalahan ini Pemerintah Kota Surabaya menggagas suatu program inovasi untuk mengatasi Rumah Tidak Layak Huni yang berada di Surabaya, program ini di kenal dengan nama Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujan Tak Takut Kepanasan), program ini banyak melakukan penyesuaian dan terus di lakukan pengembangan. Program ini di atur dalam Perwali nomor 6 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni kota Surabaya. Dalam pelaksanaanya program ini sudah diadakan dari tahun 2013 dan pada tahun 2018 program ini beralih pada penyebutannya yang awalnya pemberdayaan sosial masyarakat miskin menjadi Rehabilitasi rumah tidak layak huni atau lebih sering di sebut Tahu Panas sehingga pada ajang inovasi pelayanan publik yang di adakan pemerintah pusat program ini masuk ke dalam Top 40 inovasi pelayanan publik.

Dalam aturannya program Tahu Panas ini terdapat di bab 2 pasal 2 dimana program ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan sosial dengan cara meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin dengan cara merenovasi kondisi rumah yang awalnya jauh dari kata sehat dan aman menjadi rumah yang sehat dan aman. Program ini juga didasari dengan beberapa prinsip yakni akseptabel, transparan, akuntabel, keterpaduan, kemitraan, kesetiakawanan, kemanfaatan, dan partisipasi. Adanya program ini di harapkan akan berdampak pada kualitas hidup masyarakat dimana terjadinya peningkatan kualitas hidup. Jika program seperti ini tidak diadakan maka akan dikhawatirkan muncul masalah-masalah baru seperti:

- a) Masalah kesehatan dimana jika hunian yang menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, dengan kondisi yang tidak layak untuk di huni akan berdampak pada kesehatan penghuninya, contohnya kedepannya ruangan, karena tidak adanya pencahayaan serta sirkulasi udara yang menyebabkan rumah tersebut terasa lembab dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan penghuni rumah
- b) Masalah pendidikan, jika hunian saja sudah masuk dalam kategori kebutuhan yang tidak bisa untuk di penuhi oleh masyarakat otomatis masyarakat akan lebih berfokus untuk memenuhi kebutuhan yang lain seperti makanan dan pakaian ,sedangkan untuk pendidikan akan menjadi fokus kesekian sampai bahkan diabaikan karena masyarakat merasa tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan.
- c) Masalah keamanan , dengan kondisi rumah yang jauh dari kata layak, rumah akan sulit untuk menjadi tempat perlindungan bagi penghuninya dimana saat terjadi pergantian cuaca yang ekstrim seperti panas, hujan, dan akhirnya terjadi banjir dan longsor rumah akan mudah roboh dan tidak akan kuat menahan tekanan dari cuaca tersebut. Hal ini akan membahayakan penghuni.
- d) Masalah keharmonisan rumah tangga akan terdampak hanya dengan kondisi hunian yang tidak layak untuk di tempati. Karena di dalam rumah setiap keluarga melalui banyak hal baik dari senang susah sedih sakit semua bisa terjadi di dalam rumah, dengan keadaan rumah tidak layak di huni perasaan yang di bawah oleh penghuni bisa saja tidak nyaman dengan keadaan tersebut sehingga emosi tidak dapat di kontrol, sehingga pertengkaran pasti akan sering terjadi antar satu dengan yang lain.

Dalam Pelaksanaanya Program Tahu Panas ini menggunakan pendekatan *bottom up* dan menggunakan konsep *Community Based Development*, dimana konsep ini ingin mewujudkan *redistribution of power* atau partisipasi masyarakat (*community participatory*) dari masyarakat yang dianggap lemah dan tidak mampu (Poerbo, 1999). Cara yang di lakukan dalam pembangunan lingkungan untuk rakyat yang berdasarkan pada upaya pemberdayaan serta dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat bawah sehingga terjadinya keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran yang di inginkan. Selain adanya konsep partisipasi masyarakat dalam program ini juga menerapkan sistem pemberdayaan yang



dilaksanakan melalui peningkatan kualitas lingkungan kawasan pemukiman yang layak di daerah perkotaan, sehingga diharapkan tidak akan menjadi hambatan dari salah satu atau beberapa konsep pembangunan yang akan diwujudkan.

Dalam program Tahu Panas menggunakan konsep ini memberikan dampak dimana saat dilapangan kegiatan dilaksanakan berdasarkan aspirasi serta inisiatif masyarakat sehingga terjadinya *political choice*. Dalam kegiatan ini masyarakat memiliki kontribusi dan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program ini, dimana masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan cara musyawarah dengan pihak Kesepakatan Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi Sosial (KKPRS) hal ini bertujuan untuk memperluas sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah. Adapun data perkembangan pelaksanaan program Tahu Panas di kota Surabaya, sebagai berikut:



**Gambar 1 Perkembangan Program Tahu Panas Pertahun**  
Sumber : Youtube SINOVIK Kementerian PARNB tahun 2020

Dari gambar di atas dapat dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2019 program Tahu Panas memiliki grafik yang terus meningkat, walaupun di tahun 2019 ada penurunan tetapi tidak terlalu signifikan hal ini membuktikan bahwasanya masih banyak sekali tempat tinggal yang tidak layak huni yang masih tersebar di seluruh kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya satu unit rumah diberikan dana pekerjaan sebesar 30 juta rupiah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Surabaya. Saat tahun 2019, konsep hunian layak huni dan sehat menjadi fokus pembangunan saat itu. Dimana dengan terciptanya hunian yang nyaman, kuat, dan aman akan menekan jika ada masalah seperti aman dari ancaman konsleting listrik yang menyebabkan kebakaran aman dari segala bentuk penyakit yang bisa menyerang seperti keadaan rumah yang tidak ada ventilasi udara dan cahaya.

Lebih lanjut untuk tahun 2020 dan 2021 belum ada perbaikan rumah tidak layak huni dikarenakan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan semua kegiatan pemerintah di fokuskan untuk menekan pertumbuhan persebaran Covid di Indonesia tak luput pula Kota Surabaya. Lalu pada tahun 2022 ini ada sedikit perubahan yang dilakukan dimana satu unit rumah diberikan biaya pelaksanaan pekerja sebesar 35 juta rupiah dengan target rumah yang akan di rehabilitasi sebanyak 842 unit hal ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan di mana pada tahun-tahun sebelumnya perbaikan rumah layak huni bisa mencapai

ribuan. Adapun kriteria rumah yang masuk dalam kategori penerimaan bantuan Program Tahu Panas sebagai berikut:



**Gambar 2 Contoh Rumah Tidak Layak Huni Yang Masuk Dalam Kriteria Program Tahu Panas**

*Sumber: Web Media Indonesia 2022*

Gambar diatas merupakan salah satu contoh kriteria rumah hunian yang kurang layak untuk di tinggali yang mana masuk dalam spesifikasi program Tahu Panas. Adapun Kriteria yang wajib dimiliki yakni warga tersebut harus terdaftar dalam MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) atau masyarakat yang tidak mampu serta jelas akan akta kepemilikan tanah, sedangkan dalam perbaikannya yang diperbaiki juga harus memenuhi sejumlah kriteria diantaranya, dinding atau/dan atap dalam kondisi sudah rusak atau lapuk sehingga dapat membahayakan keselamatan penghuni. Kemudian, posisi lantai lebih rendah dari jalan dan lantai yang di gunakan masih terbuat dari tanah, papan, bambu, semen atau keramik yang sudah rusak sehingga pecahannya bisa melukai penghuni. Selain itu, rumah yang tidak memiliki jamban atau wc atau sudah memiliki jamban tetapi kondisinya kurang layak seperti penutupnya tidak ada dan tidak ada saluran pembuangannya. Untuk menerima bantuan ini juga penerimanya wajib menandatangani sejumlah surat pernyataan yang di antaranya, Rumah/Tanah tidak dalam sengketa dan akan menghuni sendiri rumah yang diperbaiki dan tidak ada penolakan dari anggota keluarga.

Alur pelaksanaan program ini dimulai dengan adanya sosialisasi di tingkat kelurahan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, setelah di adakan sosialisasi pihak RT/RW akan mengumpulkan usulan calon penerima dan memberikan datanya kepada Dinas Sosial guna dilakukan verifikasi status MBR usulan calon penerima manfaat. Kemudian, menyampaikan hasil verifikasi kepada Lurah sebagai bahan musyawarah Kesekapakatan Rencana Perbaikan Rumah (KRPR). Pada tahap ini seringkali akan muncul beberapa masalah seperti skala prioritas utama akan di tuju pada kondisi rumah yang benar-benar butuh perbaikan. Menyikapi hal ini kerap kali masyarakat tidak menerima keputusan sehingga muncul rasa iri satu sama lain dan akhirnya timbulnya konflik antar warga, selain itu adanya kedekatan kekeluargaan dengan pihak-pihak yang bertugas akan mempengaruhi siapa dahulu yang akan menerima bantuan ini.

## II. Landasan Teori

### Implementasi

Implementasi prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya, Webster (Widodo, 2001; 191) dijelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Dalam analisa kebijakan Dye dan Jonnes (Dye dan Jones, 1971; 48) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksana suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif. Implementasi kebijakan adalah suatu pelaksana kegiatan dengan mengikuti beberapa langkah yang ditetapkan terdahulu dalam kebijakan untuk mencapai tujuan (Sebatier dan Mazmania, 1986; 25).

Van Meter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program. Teori implementasi dari Van Meter Van Horn memiliki beberapa indikator seperti:

- a. Melihat standar sasaran, ukuran dan tujuan kebijakan dari program Tahu Panas.
- b. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam mendukung program Tahu Panas
- c. Karakteristik agen pelaksana dalam melaksanakan program
- d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana program
- e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang berperan dalam pelaksanaan Program
- f. Serta dampak atau pengaruh Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik dalam pelaksanaan program

### Pengertian Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Westra (1989:236) mengatakan bahwa "program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya". Siagian (dalam Westra 1989:124) mengatakan bahwa "penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu". Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) Tujuan yang dirumuskan secara jelas; b) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut; c) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin; d) Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut; e) Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri; f) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut (Bintoro 1987:181).



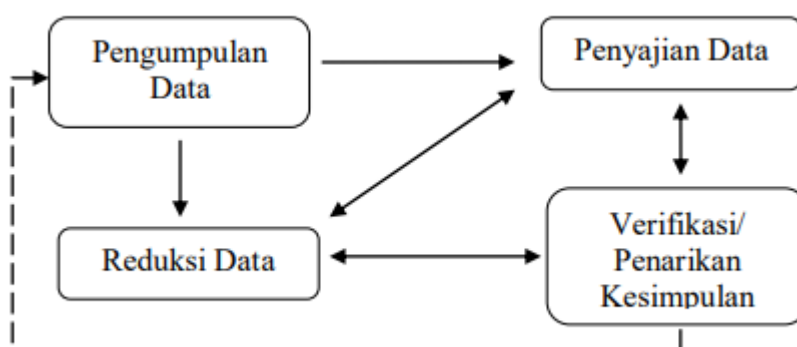
### III. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Surabaya khususnya untuk pencarian dan pengumpulan data dilakukan pada Dinas Sosial Kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu akan memaparkan dengan mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat pelaksanaan program Tahu Panas melalui kegiatan observasi, kemudian semua peristiwa, kejadian dan gejala tersebut diuraikan dalam kata-kata yang tertulis melalui kegiatan pengolahan data. Setelah data dirasa cukup dan siap akan ditarik kesimpulan dari data tersebut melihat apakah Program Tahu Panas dalam pelaksanaannya berjalan baik atau tidak.

Dalam pelaksanaan Program Tahu Panas (Tak Takut Kehujan Tak Takut Kepanasan) Guna Merahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surabaya peneliti akan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang digunakan saat proses pelaksanaan program, serta apa saja faktor yang menjadi penghambat dan pendukung jalannya program Tahu Panas ini. Adapun cara peneliti melihat pelaksanaan program dengan menggunakan teori Van Meter Van Horn, dan indikator-indikator teori ini yang akan menjadi fokus untuk dilakukan observasi, setelah semua data yang diperlukan sudah dikumpulkan maka akan diolah dan akhirnya akan dirangkum dan ditarik kesimpulan akhirnya apakah pelaksanaan program Tahu Panas ini berjalan dengan baik atau tidak.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi langsung di lapangan tempat pelaksanaan program Tahu Panas serta wawancara langsung dengan beberapa informan seperti 1 kepala seksi Rutilahu, 1 pendamping program dan 5 masyarakat penerima bantuan program Tahu Panas. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen hasil dari program Tahu Panas, arsip laporan pertanggungjawaban program dan tabel-tabel yang disediakan oleh Dinas Sosial mengenai perkembangan Program, serta data yang diperoleh dari responden dan peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan program Tahu Panas.

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode-metode: Observasi; Wawancara; dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti: Reduksi Data; Penyajian Data; dan Menarik Kesimpulan, seperti gambar 3 berikut:



**Gambar 3 Komponen Dalam Analisis Data**

*Sumber : (Soegiyono, 2011)*

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Woll (1966) mengungkapkan bahwa kebijakan publik ialah jumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut. Dalam program Tahu Panas yang diatur di dalam perwali No.6 Tahun 2019 sendiri merupakan terobosan pemerintah kota Surabaya dimana pemerintah melihat masih jauh dari kata layak dihuni. Untuk itu program Tahu Panas di hadirkan guna mengatasi masalah tersebut. Dalam pelaksanaannya ada 3 pengaruh tindakan pemerintah sehingga melaksanakan kebijakan ini yakni:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat, karena dengan program Tahu Panas akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat kota Surabaya. Dimana diketahui sendiri jika dengan keadaan rumah yang masih jauh dari kata layak akan menimbulkan masalah baru seperti masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan bahkan hubungan keluarga. Oleh karena itu, program ini hadir untuk mencegah adanya masalah lainnya muncul.
2. Adanya output kebijakan, dimana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari kebijakan ini diatur didalam perwali nomor 6 tahun 2019 serta jumlah anggaran yang disediakan untuk per unit rumah sebesar 35 juta dan pelaporan pertanggungjawaban harus diserahkan per termin dana yang diberikan. Dalam program ini terdapat 3 termin pengeluaran dana pembangunan.
3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dampak dari program ini bisa dilihat bahwa kehidupan masyarakat kota Surabaya menjadi lebih baik, dimana masyarakat akhirnya memiliki hunian yang layak dan terhindar dari ancaman lingkungan luar.

##### Implementasi Program Tahu Panas

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation (1975)*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

##### a) Standar sasaran, Ukuran dan Tujuan Program Tahu Panas

Tujuan serta sasaran program Tahu Panas sudah sangat jelas, mulai dari pemerintah, para pelaksana hingga penerima bantuan paham betul tujuan dan sasaran program ini untuk mensejahterakan masyarakat Kota Surabaya dengan membantu memenuhi salah satu kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, serta sasaran dari program ini yakni masyarakat dengan pendapatan ekonomi yang rendah dan masih jauh dari kata sejahtera. Serta kegiatan

pelaksanaan program ini sangat terikat dengan peraturan pemerintah yang terkait yakni Perwali nomor 6 tahun 2019.

Selain itu dari hasil wawancara yang di lakukan peneliti antara pelaksana program dan penerima program memiliki sinergitas yang cukup baik sehingga partisipasi masyarakat yang menggunakan konsep *Community Based Development* yang di anut di dalam program ini juga berjalan dengan baik. Wujud keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Masyarakat dari awal sosialisasi oleh Dinas Sosial telah dilibatkan, guna mendapatkan informasi mengenai program Tahu Panas ini lalu saat sosialisasi selesai pihak RT/RW yang tergabung dalam LPMK akan turun survei untuk mendata calon penerima program, lalu setelah itu diadakan musyawarah penetapan penerimaan bantuan. Disaat penetapan penerima masyarakat bisa mempertanyakan mengenai kelayakan penerima bantuan, selain itu musyawarah ini masyarakat akan ada yang dipilih menjadi KTPR (Kelompok Teknis Pembangunan Rumah) hal ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dari tahap perencanaan cukup mengambil peran yang cukup besar. Hal ini di sebabkan pelaksana program dan penerima program paham tugas serta fungsi mereka di dalam program ini.

#### **b) Sumber Daya yang ada dalam Program Tahu Panas**

Sumber daya yang tersedia dalam program ini jika di lihat memang perlu banyak perbaikan mulai dari sumber daya manusia sampai sumber daya bahan pembangunan yang sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaan program, karena adanya penerimaan profesi yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga perlu ada perbaikan dimana orang-orang yang ditugaskan sebagai pelaksana program sepatutnya orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Walaupun dilihat ada keterlambatan dalam proses pembangunan tetapi para pelaksana tetap berusaha menyelesaikan hingga akhir.

#### **c) Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Karakteristik Organisasi Pelaksana yang ada di dalam Program Tahu Panas cukup baik. Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti dapat di katakan bahwa seluruh pelaksana bersedia menjalankan program ini. Para pelaksana juga merasa kegunaannya bagi sesama karna di lingkungan sekita mereka tinggal masih banyak yang membutuhkan bantuan apalagi dalam halnya rumah dimana rumah menjadi salah satu aset yang bisa melindungi penghuninya dari ancaman dari lingkungan luar. Untuk itu para pelaksana dengan senang hati melakukan semua tugas mereka di tambah lagi karna memang para pelaksana merupakan orang-orang yang memang hidup di lingkungan tersebut.

#### **d) Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana**

Komunikasi antar anggota pelaksana bisa di katakan cukup baik, dilihat dari seringnya penggunaan media komunikasi elektronik yakni WhatsApp dan tak lupa untuk mengenai surat tugas di kirimkan melalui Email para pelaksana. Selain itu para pelaksana dengan instansi-instansi terkait memiliki hubungan kerja sama yang cukup intens sehingga jika di hubungi setiap instansi tersebut sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan.

#### **e) Sikap Para Pelaksana**

Dalam Program Tahu panas antar pelaksana dan para penerima bantuan memiliki hubungan yang cukup baik. Dimana penerima bantuan dan pelaksana ikut bekerja sama

dalam pengerjaan pembangunan dan tetangga sekitar juga jika ada yang ingin membantu di perbolehkan, hal ini menunjukkan kedekatan antara pelaksana dan penerima program terjalin dengan baik.

**f) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Berdasarkan hasil wawancara dapat di lihat Program ini di dukung oleh pemerintah pusat sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada kendala atau adanya aturan lain yang menyulitkan berjalannya program ini, selain itu dengan adanya pembangunan rumah yang layak akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat sehingga pada lingkungan sekitar keadaan sosial antara satu dengan yang lain dapat terjaga. Para penerima bantuan juga bisa memperbaiki keadaan ekonominya karena yang awalnya ada biaya yang di persiapkan untuk perbaikan rumah tetapi, dengan adanya program ini para penerima bisa mengalokasikan dana tersebut untuk kegiatan yang lainnya. Melihat ini semua bisa di katakan dalam program ini tidak ada kendala dari pengaruh lingkungan luar, tetapi malah mendukung terciptanya lingkungan yang lebih baik.

**IV. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Surabaya mengenai Implementasi dari program Tahu Panas (Tak Takut Kehujan Tak Takut Kepanasan) dalam merahabilitasi atau memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang ada di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan  
Dalam Program Tahu Panas pengetahuan akan standar sasaran dan tujuan para pelaksana dan penerima program sudah cukup baik hal ini dapat di lihat dengan sering di adakannya sosialisasi mengenai program.
2. Sumber Daya Program Tahu Panas  
Sumber Daya yang di sediakan oleh program ini masih kurang hal ini dapat di lihat dari sumber daya manusianya yang kurang ahli dalam bidangnya seperti dalam pembuatan LPJ, selain itu masalah dana yang di sediakan oleh pemerintah di rasa kurang karena dengan harga bahan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, di tambah lagi sumberdaya material bahan bangunan yang sering kali tidak tersedia oleh pemasok yang bekerja sama dengan pemerintah sehingga menghambat pembangunan rumah.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana  
Para pelaksana di sini memiliki tugas dan posisi yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mereka sudah melaksanakan tugas dan kewajiban dari awal perencanaan sampai pelaksanaan dengan baik.
4. Sikap Para Pelaksana  
Dalam program ini para pelaksana sudah berusaha untuk selalu berkoordinasi antara satu dengan lainnya, walaupun program ini merupakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, tetapi sikap yang di hasilkan sangat profesional sehingga program ini bisa terlaksana dengan baik.
5. Komunikasi Antar Organisasi terkait kegiatan pelaksana  
Komunikasi yang di bangun sudah sangat baik dengan bekerjasama dengan berbagai dinas terkait yang mendukung program Tahu Panas salah satunya Dinas Pertanian

dimana guna mengecek sertifikat tanah yang di serahkan benar-benar asli atau tidak. Selain itu program ini menyebabkan transparansi antar pemerintah dan masyarakat benar-benar terlihat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat meningkat kepada pemerintah.

6. Dampak Lingkungan Sosil, ekonomi dan Politik

Dengan adanya program ini banyak sekali perubahan lingkungan sosial yang di ciptakan antara lain hilangnya rasa minder antar warga yang satu dengan lainnya perihal rumah yang layak dan tidak, selain itu perekonomian warga menjadi lebih baik karena tidak harus memikirkan dana untuk perbaikan rumah, program ini juga di dukung penuh oleh pemerintah pusat sehingga pada tahun 2018 program ini masuk dalam 40 inovasi pelayanan publik terbaik di Indonesia, selain dalam pengaruh lingkungan politik juga dapat di lihat adanya pembaharuan peraturan mengenai program rehabilitasi Rumah tidak layak huni yakni dari Perwali No. 6 tahun 2019 di perbaharui menjadi Perwali No. 9 tahun 2022 (Nasional et al., 2020) dengan letak perbedaannya pada dinas pelaksana program di alihkan yang semula di pegang oleh Dinas Sosial di alihkan kepada Dinas Perumahan Rakyat. Pada pelaksanaannya Program ini pada tahun 2021 telah membangun 623 Unit rumah dengan dana yang di realisasikan sebesar 20.559.000.000 miliar rupiah.

**Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dirumuskan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Program ini sebaiknya terus dilakukan sampai benar-benar rumah yang berada di kota surabaya masuk dalam kategori rumah yang layak untuk di huni.
2. Dalam Masalah Sumber daya Manusia yang mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam program ini sebaiknya masyarakat yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya, agar untuk pemermasalahan sumberdaya manusia yang menghambat program bisa teratasi. Seperti mendata mahasiswa atau lulusan dari program studi yang berkenaan dengan program perbaikan rumah, salah satu contohnya arsitek dan lain sebagainya.
3. Untuk persediaan bahan baku bangunan sebaiknya pemerintah tidak hanya bekerja sama dengan 1 atau 2 pemasok saja tetapi bekerja sama dengan semua pemasok bahan bangunan yang ada di kota Surabaya sehingga jika ada kendala mengenai bahan yang tidak tersedia pada pemasok yang satu masih ada opsi lain pada pemasok yang lainnya. Sehingga pembangunan tidak perlu di tunda karena harus menunggu barang yang sesuai ada.
4. Untuk dananya sendiri dimana 1 unit rumah di berikan sebesar 35 juta rupiah, jika dilihat dari harga barang yang tiap tahunnya naik tetapi spesifikasi bahan tidak berubah maka hal ini perlu di kaji kembali dimana pemerintah bisa menaikkan jumlah yang di keluarkan di sesuaikan dengan harga pasar.



**DAFTAR PUSTAKA**

- ALFIANSYAH, R. H. 2021. (2019). No Title. In <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178453/>  
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/178453/>
- Anggara, S. (2014). Pengantar Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia.
- AV NINDI. (n.d.). *f7671bf82108a03891c2de0dba5575328bd9fdcf @ eprints.uwp.ac.id*.  
<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3164/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020. In *Badan Pusat Statistik* (Issue 5).
- Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif Edisi Kedua (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya). Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Budihardjo, Eko. (2009). Perumahan & Permukiman di Indonesia, Bandung : PT. Alumni.
- Hayat, H., Malang, U. I., Pendapatan, P., Berbasis, D., & Usaha, P. (2019). *Buku Kebijakan Publik. September*.
- Husaini Usman. (2008). Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Houghton. (2012). Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta : Karya Salemba Empat.
- Idrus, Muhammad.(2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Erlangga: Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Public Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Irwan, Mulyanto, Ratna dewi. (2008). Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia .Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan.
- Ir. Hendra Hamid, M. S. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In *De La Macca* (Vol. 1, Issue 1).
- Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205.  
<https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>
- Lexi, & Moleong. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Rake Sarasin*, 54–68.  
<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Maslow, Abraham. (2010), *Motivation and Personality*, Jakarta: Rajawali.
- Mulyanto, Irwan.(2013). pembagunan perumahan dan permukiman di indonesia.
- Mulyadi, Deddy. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik.Bandung:Alfabeta
- Musthofa, Bisri. (2008). Kamus Kependudukan, Yogyakarta: Panji Pustaka. Jakarta: Direktorat Permukiman dan Perumahan.
- Miranda, H. (2018). Teori dan Model Implementasi Publik. *ResearchGate, April*.

- Nasional, P., Penyusunan, C., Penyusunan, T. C., Pelaksanaan, E., Pembangunan, R., & Pemerintah, R. K. (2020). *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 2017, 1–17.
- Nisa, N. K., & Salomo, R. V. (2019). Keterlibatan Masyarakat dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p1-7>
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi dan Implementasi*.
- Prayitno, Budi. (2012). *kesejahteraan rakyat atas papan akselerasi perumahan kebutuhan papan*. Jakarta: Adang Setiana.
- Ridho, Muhammad. (2001). *Kemiskinan di Perkotaan*, Semarang: Penerbit Unissula.
- Santoso, Urip. (2014). *Hukum Perumahan*. Surabaya : Kencana.
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang : CV Citra Intrans Selaras.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Utara, U. S. (2016). *Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development Dalam*.
- Vivi Gorahe, L., Waani, F., & Tasik, F. (1967). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Dalako Bambahene Kecamatan Tatoareng Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(1), 5–24.
- Wonorejo, S. S., Merah, T., Susun, R., & Sewa, S. (2015). *Salinan Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 1965, 1–7. [https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali\\_2029.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_2029.pdf)
- Yunus, S. (n.d.). *MODEL PEMBERDAYAAN*.

## Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China

**Aprilia Dwi Rasdiyanti<sup>1</sup>, Suyeno<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik,  
Universitas Islam Malang, Indonesia

\*Corresponding author: suyeno@unisma.ac.id

### **Abstract**

*This research describes the results of the SWOT analysis of the implementation of the Local Currency Settlement (LCS) policy carried out by the countries of Indonesia and China in trade and investment activities. The research uses a literature review as a method and using SWOT analysis as an analytical technique with secondary data as a data source. Secondary data were collected from literature reviews of journals, websites, books, and news articles. The results of this discussion include the advantages of implementing LCS such as transaction efficiency, and currency standardization using SNAP, weaknesses in implementing LCS such as currency rate cannot always be the same and will change according to world financial markets, challenges in implementing LCS include data security threats such as Card Skimming, Carding, and Phishing and financial crises such as inflation, as well as opportunities for implementing LCS such as increasing Indonesia's export power to China with easy access to LCS services for large businesses and Indonesian UMKM.*

**Keywords:** Local Currency Settlement, Analysis, Indonesia, China

### **I. Pendahuluan**

Berbagai negara mulai mengurangi efek dominasi mata uang Dolar Amerika Serikat dalam hal pembayaran atau transaksi perdagangan. Rusia mende-dolarisasi neraca dagangannya, aset bank hingga perusahaan energi raksasa mereka juga turut menggunakan Rubel (mata uang Rusia) sebagai mata uang dalam kegiatan transaksi. Tidak hanya Rusia, China yang muncul sebagai kekuatan ekonomi raksasa di Asia mulai meninggalkan Dolar dan menggunakan Yuan sebagai alat transaksi dengan beberapa negara. Bank sentral di China dan Uni Eropa juga membuat perjanjian perdagangan dengan negara-negara lainnya untuk menggunakan mata uang mereka masing-masing dan mengabaikan sanksi dari Amerika Serikat. Uni Eropa juga membuat instrumen Instex dengan negara-negara mitra mereka agar dapat melakukan transaksi tanpa harus takut mendapat sanksi dari Amerika Serikat (Rinaldi, 2020).

Pada April 2019, keempat negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menandatangani kesepakatan penggunaan uang lokal sebagai mata uang transaksi perdagangan bilateral, sehingga penggunaan Rupiah semakin luas di kalangan negara ASEAN. Hal ini menjadi peluang bagi Indonesia dalam menguatkan nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah juga mendapatkan sentimen positif setelah mulai menurunnya tensi perang dagang AS - China yang ditandai dengan pembelian barang AS pada tanggal 15 Januari 2020 senilai USD 200 miliar, dengan turunnya tensi perang dagang AS-China, Indonesia memiliki peluang yang baik untuk mengurangi penggunaan Dolar Amerika Serikat, terlebih saat volume perdagangan Internasional Indonesia pada November 2019 mencapai USD 309.272 juta (Rinaldi, 2020).

Dolar Amerika Serikat pada mulanya menjadi mata uang transaksi di berbagai negara karena di pandang stabil, hal ini dikarenakan Amerika Serikat mempunyai nilai bisnis yang tinggi dengan negara- negara di dunia. Transaksi yang menggunakan Dolar AS kemudian menjadi lebih luas tidak hanya bagi kegiatan perdagangan dengan Amerika Serikat saja, namun juga negara-negara yang tidak memiliki hubungan perdagangan dengan Amerika turut menggunakan Dolar AS saat transaksi (Frassminggi, 2014).

Kebiasaan ini menjadikan negara-negara di dunia memiliki ketergantungan pada Dolar AS, akibatnya negara-negara di dunia harus tunduk patuh terhadap yurisdiksi AS untuk menghindari sanksi ekonomi yang dibuat oleh AS. Seperti kesewenang- wenangan AS saat memutus sepihak perjanjian nuklir Iran 2015 pada tahun 2018 dan mengancam perusahaan asing yang melakukan hubungan bisnis dengan Iran. Setelah kebijakan tersebut diberikan, perusahaan energi milik Perancis bernama Total akhirnya harus bersiap untuk meninggalkan proyek ladang gas alamnya yang sudah dimulai pasca perjanjian nuklir dengan Iran tahun 2015. Sanksi yang diberikan oleh AS saat mengancam tersebut membahayakan perusahaan multinasional seperti Total dan perusahaan Uni Eropa lainnya yang ingin berbisnis dengan Iran. Oleh sebab itu, negara-negara Uni Eropa berani mengambil langkah tidak menggunakan Dolar AS dan mengurangi dominasi Dolar AS di Uni Eropa (Sebayang, 2019).

Saat negara-negara di Eropa maupun China dan Korea Selatan mengurangi ketergantungan transaksi internasional menggunakan mata uang Dolar AS, Indonesia juga memanfaatkan peluang tersebut dan mulai mengadakan kesepakatan perdagangan internasional dengan menggunakan sistem pembayaran *Local Currency Settlement* (Transaksi menggunakan mata uang lokal). Selain dengan negara ASEAN, Indonesia melakukan kesepakatan dengan Jepang dan China untuk menjadikan LCS sebagai sistem pembayaran terlebih pada transaksi perdagangan. Pada 22 September 2020 lalu Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan China mengenai LCS dan pada bulan Agustus 2021 Indonesia lewat Bank Indonesia dan China diwakili People's Bank of China sepakat untuk menerapkan LCS atau penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan kedua negara. Hal ini disambut antusias oleh pelaku usaha dari kedua negara, perbankan serta Apindo sebagai organisasi para pengusaha (Kemendag RI, 2021).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral menggunakan Mata Uang Lokal yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 23/16/PADG/2021 untuk mendukung penerapan LCS Bank Indonesia dan People's Bank of China menunjuk bank-bank di kedua negara yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran dengan mata uang lokal. Bank-bank yang telah ditunjuk oleh kedua negara ini disebut sebagai bank fasilitator atau *Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*. Beberapa syarat untuk menjadi bank ACCD antara lain telah berpengalaman dalam memberikan fasilitas transaksi perdagangan dan investasi di kedua negara. Bank-bank tersebut harus memiliki kapasitas dalam penyelenggaraan berbagai jasa keuangan serta memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan bank di negara mitra (BI, 2021).

China menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat investasi tinggi di Indonesia, terlebih setelah kebijakan BRI (*Belt and Road Initiative*) milik China, nilai investasi China ke Indonesia semakin bertambah. Berbagai proyek pembangunan seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di beberapa wilayah Indonesia dan kerjasama di bidang perdagangan dan maritime lainnya tidak terlepas dari investasi yang diberikan oleh China. Selama masa Presiden Jokowi pada tahun 2014 saja, nilai investasi China ke Indonesia hampir mendekati angka USD 800 juta atau senilai IDR 10,8 triliun dengan jumlah

menyamai 501 unit proyek, dan jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2016 senilai USD 2,6 miliar atau sebesar IDR 35,2 triliun dengan 1.734 proyek yang dikerjakan (Perkasa, 2019).

China termasuk mitra dagang terbesar yang dimiliki Indonesia dengan adanya peningkatan volume perdagangan antara China dan Indonesia maka kedua negara memiliki potensi kerja sama yang semakin kuat di masa depan. Pada tahun 2020, nilai perdagangan Indonesia dan China mencapai USD 71,4 miliar, sedangkan pada ranah ekspor pada semester pertama tahun 2021, Indonesia mampu mencapai USD 22,45 miliar atau sekitar 21,82 persen dari total ekspor Indonesia. Kabar baik ini berbanding lurus dengan implikasi positif adanya kebijakan LCS antar kedua negara. Kedepannya implementasi LCS diharapkan oleh berbagai pihak terutama pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kerja sama ekonomi serta mengurangi tingkat resiko nilai valuta asing, pelaku eksportir dan importir juga akan mendapatkan perlindungan efisiensi harga, investasi dan perdagangan serta efektivitas transaksi pertukaran mata uang kedua negara dengan harga rendah (Kemendag RI). Namun kebijakan LCS tentu tidak dapat menghilangkan dominasi dolar sepenuhnya, dan resiko baru dalam penerapan tidak dapat dihindarkan, misal saja resiko yang diakibatkan inflasi, gejolak politik kedua negara, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter di kedua negara. Untuk itu maka peneliti ingin mengkaji kelebihan, kekurangan, peluang, dan hambatan dari kebijakan LCS Indonesia – China ini bagi Indonesia .

## II. Landasan Teori

### Teori Politik Ekonomi

Seringkali terdapat bias pengertian antara ekonomi politik dan politik ekonomi. Menurut Watson yang merupakan pakar ekonom global lebih mengartikan politik ekonomi sebagai turunan dari disiplin ilmu hubungan internasional sedangkan Broome memilih tidak mendikotomi antara politik ekonomi dan hubungan internasional, dilain pihak, Stillwell berpendapat politik ekonomi adalah disiplin ilmu yang berfokus untuk menganalisis peristiwa ekonomi dari sudut pandang ilmu sosial, yang mana kedudukan ilmu politik ekonomi lebih kompleks dan luas daripada ilmu politik (Malik, 2020). Kemudian ekonomi politik menurut Frieden & Lake diartikan sebagai sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi, berbeda dengan pendapat Frieden , Strange berargumen bahwa ekonomi politik merupakan studi yang berfokus pada distribusi nilai-nilai seperti kekayaan, kebutuhan materiil, keamanan, kebebasan, keadilan, dan kebebasan (Mas'oed, 2008).

Pandangan dan paradigma mengenai politik dan ekonomi berkembang seiring dengan dinamika politik dan ekonomi global, namun Malik berhasil menemukan perbedaan mendasar di antara dua perspektif tersebut, karena kedua konsep antara politik ekonomi dan ekonomi politik tidak dapat disamakan agar tidak terjadi salah kaprah dalam melakukan analisis dan aplikasi dalam memahami kedua konsep tersebut. Malik mendasarkan perbedaan ekonomi politik dan politik ekonomi dari ontologi dan epistemologinya. Jika ekonomi politik berpandangan mengenai permasalahan politik dari sudut pandang ekonomi , maka politik ekonomi memandang ilmu ekonomi dari sudut pandang politik. Hal ini dilihat dari sejarah hadirnya pendekatan dan metodologi ilmiah yang ada pada mazhab neoklasik yang dilestarikan oleh *American School* dan diteruskan ke berbagai belahan dunia yang menerapkan kurikulum dan sumber rujukan yang sama , dimana studi ekonomi politik lebih mendominasi dan penyebarannya melahirkan mekanisme penyelesaian masalah dengan



pendekatan ekonomi politik. pendekatan ini cenderung memandang pasar sebagai instrumen yang dapat lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Berbeda dengan pendekatan yang berkembang dari pakar dan akademisi di *British School* serta *Australian School* yang lebih cenderung menitikberatkan pada politik ekonomi. Pendekatan ini melihat bahwa peran aktor politik sangat penting dalam aktivitas ekonomi secara global maupun nasional. Selain itu, kekuasaan mendapat perhatian lebih karena dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi (Malik, 2020).

Dalam perspektif politik ekonomi, kebijakan publik dipandang sebagai produk dari kekuasaan politik pemerintah dimana lebih lanjut menurut penjelasan Easton kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah memiliki kekuasaan otoritas dalam sistem politik. Otoritas ini memberikan dampak kepada masyarakat luas (Agustino, 2017). Penelitian ini membahas salah satu kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam bidang perdagangan internasional. Kebijakan tersebut disebut *Local Currency Settlement* atau pembayaran transaksi perdagangan menggunakan mata uang lokal. Kebijakan LCS hadir untuk mengatur cara baru melakukan pembayaran transaksi perdagangan antar negara Indonesia dan China menggunakan mata uang lokal sebagai alat tukar atau alat transaksi.

### Framework Kebijakan *Local Currency Settlement* Indonesia dan China

Framework *Local Currency Settlement* (LCS) adalah program Bank Indonesia untuk menginternasionalisasikan Rupiah dengan cara menjalin kerjasama dengan negara mitra ekonominya dalam penggunaan sistem pembayaran mata uang lokal pada setiap transaksi perdagangan maupun investasi. Untuk mendukung penerapan LCS Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBoC) menunjuk bank-bank di kedua negara yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan transaksi pembayaran dengan mata uang lokal (Bank Indonesia, 2020). Bank-bank yang telah ditunjuk oleh kedua negara ini disebut sebagai bank fasilitator atau *Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*. Berikut adalah daftar Bank ACCD yang telah ditunjuk BI dan PBoC:

**Tabel 1. Bank yang ditetapkan sebagai Bank ACCD oleh BI dan PboC**

Bank di Indonesia	Bank di China
PT. Bank Central Asia, Tbk	Agriculture Bank of China
Bank of China (Hongkong), Ltd	Bank of China
PT. Bank China Construction Bank Indonesia, Tbk	Bank of Ningbo
PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	Bank Mandiri Shanghai Branch
PT. Bank ICBC Indonesia, Tbk	China Construction Bank
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk	Industrial and Commercial Bank of China
PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	Maybank Shanghai Branch
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	United Overseas Bank (China) Limited
PT. Bank OCBC NISP, Tbk	
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	
PT. Bank UOB Indonesia	

Sumber: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp\\_2322721.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp_2322721.aspx)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank didapati mekanisme pembayaran transaksi menggunakan LCS adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah LCS Cina membuka rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Rupiah yang dibuka oleh Bank ACCD Indonesia di negara Cina untuk mendukung pelaksanaan LCS.
- b) Nasabah LCS Indonesia membuka rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Yuan yang dibuka oleh Bank ACCD China di negara Indonesia untuk mendukung pelaksanaan LCS.
- c) Nasabah LCS di kedua negara melakukan transaksi pembayaran baik berupa perdagangan maupun investasi melalui rekening yang masing-masing telah dibuat.
- d) Bank yang ditunjuk sebagai ACCD melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi transaksi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dan disepakati kedua bank sentral negara tersebut.

### III. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun penelitian kepustakaan menurut Zed ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan data sekunder dimana data tidak diambil oleh peneliti secara langsung melainkan diambil dari buku, jurnal, artikel internet, laman berita, dan bahan bacaan lain yang sudah dipilih sesuai dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari tahap *editing, organizing, dan finding*. Pada tahap awal yaitu *editing*, peneliti memeriksa data dan bahan bacaan yang diperoleh dengan mengedepankan kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya. Tahap *organizing* dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh sesuai kebutuhan penelitian, dan pada tahap terakhir atau *finding* dilakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan kaidah-kaidah teori dan metode yang telah ditentukan sehingga akan didapatkan kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik analisis SWOT yang terdiri dari *strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*. Menurut Siagian analisis SWOT merupakan salah satu dari berbagai instrumen analisis yang ampuh jika digunakan secara tepat dengan melihat beberapa faktor yang terdapat pada suatu masalah dan berusaha untuk memetakannya satu persatu (Kuswanti, 2016). Analisis *strengths* diambil untuk menganalisis kelebihan dari kebijakan LCS RI-China dan *weaknesses* digunakan untuk menganalisis kekurangan dan kelemahan dari kebijakan LCS RI-China, sedangkan *opportunity* menganalisis peluang atau kesempatan dari adanya kebijakan LCS RI-China dan *Threats* menganalisis hambatan serta tantangan yang dialami saat penerapan kebijakan LCS RI-China dilaksanakan.

### IV. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan *Local Currency Settlement* atau pembayaran transaksi menggunakan mata uang lokal merupakan salah satu bagian dari kebijakan moneter pemerintah Indonesia yang dilakukan dibawah wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral milik Republik Indonesia yang bekerjasama dengan bank-bank sentral negara mitra. Kebijakan LCS dibuat untuk memudahkan pembayaran transaksi di bidang perdagangan maupun investasi yang dilakukan antar pelaku usaha lintas negara, sebelum adanya LCS sudah terdapat kebijakan-kebijakan pembayaran lainnya yang tergolong ke dalam jenis *Cross Border Payment* atau pembayaran

transaksi ke luar negeri, pembayaran transaksi ke luar negeri yang populer misalnya L/C atau *Letter of Credit*. Untuk itu kebijakan LCS bukanlah satu-satunya mekanisme pembayaran transaksi luar negeri, namun terdapat banyak perbedaan antara LCS dengan L/C apabila ditinjau dari segi efisiensi dan efektivitas, berikut merupakan analisis SWOT mengenai kebijakan LCS:

### **Kelebihan LCS (*Strengths*)**

Kebijakan LCS jika ditinjau dari kekuatannya maka merujuk pada kelebihan mekanisme dari LCS tersebut. Dari segi mekanisme, pelaku usaha dari negara Indonesia dan negara mitra tidak harus membuat banyak dokumen khusus untuk bisa menggunakan mata uang lokal dalam bidang perdagangan seperti ekspor dan impor serta pembiayaan investasi karena mereka difasilitasi untuk membuat rekening nasabah LCS langsung. Sebagai contoh, Bank yang menjadi fasilitator pada LCS hanya satu jenis yaitu bank ACCD yang terdiri dari bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dan negara mitra seperti China. Namun berbeda dengan bank yang dibentuk sebagai fasilitator pada sistem pembayaran luar negeri L/C yang terdiri dari Bank Penerbit (*Issuing Bank*), Bank Penerima (*Advising Bank*), dan Bank Tertunjuk (*Nominnated Bank*) sehingga akan lebih efisien jika menggunakan mekanisme LCS yang diatur hanya lewat bank ACCD.

Begitupula dengan pengajuan penggunaan layanan L/C bagi pelaku usaha harus memiliki Surat Kuasa Pembebanan L/C yang ditandatangani Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Menteri Keuangan untuk diteruskan ke pihak Bank Indonesia agar dapat menarik pinjaman dan Surat Persetujuan Pembukaan L/C. Berbeda dengan LCS yang lebih mudah dalam proses pengajuan dengan membuat rekening khusus nasabah LCS baik pelaku usaha di negara China maupun pelaku usaha di negara Indonesia. Dalam segi pembiayaan dan pembayaran layanan pada LCS juga tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dan menggunakan mata uang lokal sehingga biaya konversi mata uang terjadi satu kali dalam pengurusan dan pelayanan lebih murah bagi pelaku usaha. Kelebihan LCS lainnya adalah pelaku usaha dapat mengisi saldo rekening LCS sehingga tidak memerlukan kartu kredit khusus berbeda dengan sistem L/C yang menggunakan *Letter of Credit* atau bertransaksi secara kredit dan memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan (Angelia, 2021).

Kelebihan ketiga dari penerapan LCS adalah Indonesia memiliki sendiri standarisasi transaksi pembayaran digital atau Standar Nasional Open API (SNAP) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dalam penerapan SNAP mengembangkan *Developer Site SNAP* yang terdiri dari publikasi standar, aplikasi pengujian *Open API* pembayaran berbasis SNAP yang bersifat daring, dan direktori publikasi, dengan adanya SNAP, transaksi LCS antara Indonesia dan China semakin lebih mudah, cepat, dan efisien yang akan mendukung produktivitas masyarakat dan pembangunan sistem perbankan yang modern.

### **Kelemahan (*Weaknesses*)**

Salah satu tujuan dari adanya kebijakan LCS adalah menyetabilkan dan menguatkan nilai mata uang Rupiah salah satunya dengan meng-internasionalisasikan Rupiah di negara lain, dengan perantara instrumen kebijakan, yang mana kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh kondisi politik dan keamanan suatu negara. Kebijakan LCS tunduk pada kondisi di setiap negara pengguna seperti Indonesia dan China yang memiliki isu politik dalam dan luar negeri yang dinamis serta berbeda, sehingga transaksi yang dilakukan dengan sistem LCS tidak dapat dipastikan selalu stabil dan erat kaitannya dengan fleksibilitas kebijakan bank sentral Indonesia dan Cina karena nilai tukar Rupiah dan Yuan akan ikut berubah. Contoh pengaruh

politik yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah dan Yuan misalnya ketika terjadi perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat yang saling menaikkan tarif barang impor pada tahun 2019 menyebabkan ketidakstabilan pasar uang dan pasar saham hingga dikeluarkannya keputusan Presiden Donald Trump untuk membuat kesepakatan dagang (Handoyo, 2019). Dampak dari lemahnya ekonomi China akan mempengaruhi permintaan barang ekspor Indonesia yang akan ikut turun sebab China termasuk pasar ekspor terbesar Indonesia.

Kasus selanjutnya ketika pandemi Covid-19 muncul dan ekonomi dunia lumpuh karena kegiatan investasi dan perdagangan harus terhalang oleh pembatasan sosial, ditambah konflik perang antara Ukraina dan Rusia. Dampak geopolitik dari konflik Rusia Ukraina tersebut terjadi saat Eropa dan Amerika Serikat menuntut Rusia untuk menghentikan perang, akibat Rusia menolak gencatan senjata, Amerika dan Eropa memberikan sanksi ekonomi besar-besaran kepada Rusia yang mana sanksi tersebut memperparah ekonomi dunia, mulai dari ekspor impor minyak dan gas alam, bahan pangan, dan komoditi ekspor Rusia lainnya, hal ini berdampak pula pada industri China dan Indonesia. Akibat konflik Rusia Ukraina pada kuartal 1 tahun 2022, nilai tukar rupiah harus mengalami depresiasi atau lemah sampai pada 0,33% menyebabkan investor mengalihkan dana mereka menuju aset aman (Pangastuti, 2022). Berbeda dengan China, saat Rusia disanksi banyak negara dengan pemblokiran akses menggunakan dolar Amerika Serikat, mata uang Yuan semakin menguat karena Rusia memperbanyak valas Yuan sebagai cadangan devisanya. Oleh karena itu, LCS tetap memiliki kekurangan yaitu tidak bisa memberikan standar pasti untuk konversi mata uang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang lokal serta perubahan statistik harga sekuritas dalam periode tertentu (Volatilitas).

Kelemahan LCS selanjutnya adalah kerugian negara atau defisit neraca perdagangan tetap bisa terjadi yang menyebabkan hanya salah satu pihak akan lebih diuntungkan. Ekspor China ke Indonesia lebih mendominasi pada manufaktur, untuk itu pemerintah harus tetap menjaga daya saing ekspor produk lokal ke negara mitra meskipun biaya tarifnya lebih murah karena tidak ada biaya dua kali konversi mata uang seperti bertransaksi menggunakan dolar. Terlebih dengan meningkatkan daya tawar produk Indonesia seperti pada produk manufaktur agar mendapat nilai lebih tinggi pada perdagangan global, dengan adanya peningkatan nilai ekspor maka nilai tukar mata uang di suatu negara akan semakin tinggi dan mata uang semakin kuat (Silitonga et al, 2017).

### **Peluang (*Opportunities*)**

Terdapat beberapa peluang dan kesempatan adanya penerapan kebijakan LCS antara Cina dan Indonesia antara lain: Memperkuat stabilitas perekonomian dengan diversifikasi mata uang; Pelaku UMKM lokal dan industri nasional memiliki kesempatan besar untuk membuka pasar ekspor di China; dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Diversifikasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh penurunan nilai aset investasi dengan menggabungkan berbagai instrumen aset investasi. Pada diversifikasi mata uang lokal dilakukan strategi pengalihan investasi ke berbagai mata uang. Sebagai contoh, ketika kondisi perekonomian lemah akibat pandemi terjadi penurunan nilai mata uang Rupiah, maka langkah diversifikasinya dengan mengalihkan beberapa investasi menggunakan mata uang negara lain misalnya 60% IDR dan 40% USD sehingga penurunan nilai investasi dapat dikurangi, dengan transaksi menggunakan mata uang lokal, diversifikasi mata uang dapat terjadi dan ketergantungan terhadap dolar dapat diminimalisir, hal ini juga dikarenakan pelaku usaha dapat mengkonversi langsung dengan mata uang lokal negara mitra tanpa harus

menukar dengan dolar terlebih dahulu. Keuntungan ini dapat mempermudah perdagangan antara China dan Indonesia terlebih di saat dolar Amerika melemah.

Adanya kebijakan LCS antara Indonesia dan China, pengusaha lokal seperti UMKM dan produsen komoditi ekspor non migas mendapat kesempatan lebih besar untuk masuk di pasar China, hal ini dikarenakan tarif ekspor yang lebih murah, dapat menggunakan Rupiah tanpa harus membeli dolar Amerika untuk membayar transaksi, kemudahan dalam menggunakan layanan Bank ACCD, dan adanya jaminan keamanan dan kepercayaan pengguna layanan LCS, serta penyerapan tenaga kerja semakin tinggi seiring dengan peningkatan ekspor Indonesia ke China.

Volume perdagangan antara Indonesia dan China semakin meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2021 nilai ekspor Indonesia ke China mencapai 63,63 miliar USD dibanding dengan nilai impor pada tahun yang sama mencapai 60,71 miliar dolar Amerika Serikat. Pencapaian ini membuat Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan Indonesia dan China pada tahun tersebut (Zuraya, 2022). Selain itu pada tahun 2021, nilai transaksi LCS antara Indonesia dan China tahun mencapai 1,68 miliar dolar AS lebih tinggi dari pencapaian pada tahun sebelumnya sebesar 800 juta dolar AS (Elena, 2021). Adanya peningkatan volume perdagangan Indonesia dan China dengan sistem transaksi LCS, maka permintaan terhadap Rupiah meningkat dan menghasilkan stabilitas nilai Rupiah ikut mengalami peningkatan juga.

### **Tantangan (*Threats*)**

Pada kebijakan LCS Indonesia-China tantangan yang dihadapi salah satunya terkait kestabilan nilai tukar Rupiah. Sehingga pengaruh yang dapat mengancam pergerakan nilai Rupiah akan berdampak pada pembiayaan pelaku usaha yang menggunakan LCS, mulai dari penurunan kegiatan ekspor impor akibat beban biaya dan tingginya konversi nilai kurs mata uang negara China hingga kemampuan daya tawar produk ekspor Indonesia ketika bersaing di negara China. Adapun tantangan yang dihadapi dalam penerapan LCS adalah sebagai berikut: Dedolarisasi dolar Amerika Serikat bisa memicu sanksi ekonomi dari Amerika Serikat; Konflik yang diakibatkan situasi politik dan kemananan global; Krisis keuangan; Ancaman kemanan data; dan Ketergantungan ekonomi Indonesia pada China.

Dedolarisasi dolar Amerika Serikat dapat mengurangi beban mata uang untuk tetap memiliki nilai tukar stabil sehingga kegiatan perdagangan dan investasi tetap bisa berjalan, namun dapat memicu ketegangan antara Indonesia, China maupun negara lain yang menerapkan transaksi LCS dengan kekuatan sanksi ekonomi Amerika Serikat. Sebagai contoh kasus, Arab Saudi sendiri sudah melakukan transaksi minyak dengan China dan Rusia dengan kerangka LCS juga (*petroyuan*), namun di banyak negara masih dipengaruhi oleh sistem *petrodollar* dalam membayar transaksi minyak dan komoditi migas lainnya (Yovanda, 2022). Sehingga apabila Amerika Serikat memberikan sanksi seperti kenaikan suku bunga dan tarif barang impor ke negaranya maka akan berdampak pada produk ekspor Indonesia dan nilai kurs Rupiah.

Konflik dan ketegangan global seperti geopolitik dapat menimbulkan ancaman ekonomi yang berimbas pada pembatasan dan gangguan kegiatan ekspor impor sehingga pergerakan nilai tukar Rupiah terhambat, dengan adanya kondisi tersebut berdampak langsung bagi pengusaha dan investor yang berujung pada berkurangnya kemampuan pembiayaan produksi dan distribusi produk ekspor. Imbas lainnya muncul ketika risiko terkait keluarnya arus modal asing yang dapat melemahkan posisi cadangan devisa (*capital flow*). Sehingga berdampak pada pembiayaan LCS Indonesia – China oleh pelaku usaha Indonesia (Pink, 2022).



Krisis keuangan juga mempengaruhi kebijakan LCS misalnya inflasi. Inflasi yang berkepanjangan dapat mempengaruhi perekonomian nasional Indonesia. Peningkatan inflasi di suatu negara akan berimbas pada berkurangnya permintaan atas mata uang Rupiah dan kegiatan ekspor Indonesia juga ikut turun disebabkan harga produksi yang lebih tinggi (Jayantiti & Sudarmiani, 2017). Sebaliknya keadaan bisa diperparah dengan permintaan impor yang semakin tinggi dan mengakibatkan cadangan devisa negara ikut menipis, dengan adanya inflasi yang tinggi di Indonesia, maka nilai tukar valuta asing dalam hal ini adalah mata uang Yuan akan ikut terpengaruh.

Tantangan kebijakan LCS selanjutnya adalah ancaman keamanan data. Ancaman keamanan ini terkait kejahatan perbankan digital dimana pembobolan rekening nasabah LCS bisa terjadi kapanpun. Transformasi teknologi membantu mempercepat transaksi namun memiliki kerentanan terhadap keamanan. Beberapa kejahatan perbankan digital antara lain *card-skimming*, *carding*, dan *phising* (Anggraeni, 2022). *Card Skimming* ialah kejahatan yang terjadi saat pelaku kejahatan mencuri data nasabah lewat strip magnetis pada kartu kredit atau debit nasabah. *Carding* ialah kejahatan perbankan yang tidak jauh berbeda dengan *Card Skimming* namun pelaku kejahatan mendapatkan data kartu kredit dan debit secara ilegal melalui pihak ketiga seperti marketing palsu dan merchant palsu, sedangkan kejahatan perbankan yang lebih berbahaya dari *card-skimming* dan sering terjadi ialah *phising*, dimana data nasabah dicuri dengan memancing nasabah memberikan data mereka tanpa mereka sadari melalui saluran *internet banking*, sehingga uang nasabah akan hilang tanpa harus menggunakan kartu kredit dan debit terlebih dahulu.

Tantangan penerapan kebijakan LCS Indonesia-China kelima ialah Ketergantungan ekonomi Indonesia pada China. Kebijakan dan kondisi politik China dapat menyebar cepat ke Indonesia akibat semakin intensnya hubungan perdagangan di kedua negara. Kemajuan perdagangan China dipengaruhi oleh daya produksi produk ekspor mereka yang tinggi dengan bantuan teknologi mutakhir di bidang manufaktur, pertanian, dan komoditas ekspor lainnya. Selain itu Kebijakan moneter mereka berupa devaluasi mata uang Yuan juga menjadi ancaman bagi Indonesia. Devaluasi atau pelemahan mata uang lokal China menyebabkan tingginya harga impor dan murahness harga ekspor (Gosta, 2015). Murahness harga ekspor mengakibatkan daya serap produk ekspor mereka tinggi di pasaran global dan akan mempengaruhi produk-produk lokal Indonesia. Sisi lain adanya kebijakan devaluasi oleh China menyebabkan produk Indonesia sulit masuk ke pasar China karena harga tarif barang impor yang tinggi, sedangkan pendapatan nasional Indonesia lebih besar pada kegiatan ekspor untuk itu perlu peningkatan kemampuan produksi dalam negeri terkait produk-produk yang memiliki daya tawar tinggi di pasar global.

## V. Kesimpulan dan Saran

Dedolarisasi dolar Amerika Serikat menjadi salah satu upaya dan strategi untuk menyetabilkan nilai mata uang Rupiah. Dedolarisasi juga sebagai strategi apabila dolar AS melemah dan dapat mempengaruhi mata uang lainnya. Salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan dolar AS adalah menggunakan sistem pembayaran dengan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement*. Pada transaksi dengan sistem LCS Indonesia dan China kedua negara menggunakan mata uangnya masing-masing yakni Rupiah dan Yuan dalam pembiayaan perdagangan dan investasi. Penerapan LCS difasilitasi oleh bank khusus yang ditunjuk oleh sentral kedua negara yang disebut Bank ACCD. Pengusaha dan investor di kedua negara dapat membuka rekening nasabah LCS melalui bank tersebut dengan pedoman mekanisme peraturan yang sudah ditentukan oleh bank sentral kedua negara.

Penyelesaian transaksi menggunakan LCS memiliki kelebihan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Kelebihan dari penerapan LCS antara lain kemudahan dalam pengajuan nasabah LCS, efisiensi transaksi, dan standarisasi mata uang dengan menggunakan SNAP. Kelemahan LCS ialah sebagai kebijakan moneter maka dapat mudah dipengaruhi oleh kondisi politik di negara Indonesia dan China, kuota nilai tukar mata uang tidak bisa selalu sama dan akan berubah sesuai pasar keuangan dunia, dan salah satu negara dapat lebih diuntungkan atau dirugikan akibat persaingan perdagangan dan investasi yang mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal.

Tidak hanya kelebihan dan kelemahan, peluang dari penerapan LCS berdampak pada diversifikasi mata uang yang dapat meminimalisir penurunan nilai investasi dan ketergantungan kepada satu mata uang tunggal seperti dolar AS, meningkatnya daya ekspor Indonesia ke China dengan kemudahan mengakses layanan LCS bagi pelaku usaha besar maupun UMKM Indonesia, membuka pasar ekspor Indonesia lebih besar di China dan penyerapan tenaga kerja, serta terjadinya stabilitas ekonomi. Tantangan yang dialami dalam penerapan LCS Indonesia dan China meliputi ancaman ketegangan dan keamanan global, ancaman sanksi ekonomi dari Amerika Serikat, ancaman keamanan data seperti *Card Skimming*, *Carding*, dan *Phising*, krisis keuangan seperti inflasi, ketergantungan perekonomian terhadap China dan ancaman kebijakan devaluasi mata uang China yang dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Adanya penerapan LCS memiliki banyak manfaat bagi Indonesia yaitu volume perdagangan Indonesia dan China semakin meningkat dengan kemudahan dalam pembayaran menggunakan mata uang lokal serta hubungan bilateral Indonesia di bidang perdagangan dan investasi semakin erat. Kedepannya penelitian terbaru diharapkan dapat membahas lebih jauh mengenai penerapan LCS di negara China dan negara-negara lain sebagai mitra dagang Indonesia sekaligus membahas pengaruh LCS terhadap peningkatan daya ekspor Indonesia dan China.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anggraeni, R. (2022). Ini Jenis-Jenis Kejahatan Digital Perbankan dan Tips Menghindarinya! <https://finansial.bisnis.com/read/20220507/90/1530596/ini-jenis-jenis-kejahatan-digital-perbankan-dan-tips-menghindarinya>
- Bank Indonesia. (2020). Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal Melalui Bank.
- BI. (2021). Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 23/ 16 /PADG/2021 tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral antara Indonesia dan Tiongkok Menggunakan Rupiah dan Yuan melalui Bank. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG\\_231621.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_231621.aspx)
- Br Silitonga, R., Ishak, Z., Mukhlis, D., Jurusan, M., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Sriwijaya, U., & Pembangunan, J. E. (2017). Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 53–59. <https://doi.org/10.29259/JEP.V15I1.8821>
- Elena, M. (2021). Transaksi LCS RI dan China Capai US\$15 Juta per Bulan, Ini Komentar BI. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211223/9/1481184/transaksi-lcs-ri-dan-china-capai-us15-juta-per-bulan-ini-komentar-bi>

- FBN. (2022). Perang Rusia-Ukraina Bikin Yuan China Mendunia : Okezone Economy. <https://economy.okezone.com/read/2022/03/29/320/2569523/perang-rusia-ukraina-bikin-yuan-china-mendunia>
- Frassminggi, K. (2014). Dari bretton woods ke petro-dollar: analisis dan evaluasi kritis sistem moneter internasional. *Global Dan Strategis*, Vol. 8 No., 233–254. <http://journal.unair.ac.id/JGS@dari-bretton-woods-ke-petro-dollar--analisis-dan-evaluasi-kritis-sistem-moneter-internasional-article-7711-media-23-category-8.html>
- Gosta, D. R. (2015). Apa Arti Devaluasi Yuan? <https://ekonomi.bisnis.com/read/20150826/9/465979/apa-arti-devaluasi-yuan>
- Handoyo. (2019). China menaikkan tarif barang-barang asal AS US\$ 60 miliar mulai 1 Juni. <https://internasional.kontan.co.id/news/cina-menaikkan-tarif-barang-barang-asal-as-us-60-miliar-mulai-1-juni>
- Kemendag RI. (n.d.). Laporan Triwulan (LAPTRI) Kementerian Perdagangan 2021 - Triwulan II - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Retrieved September 16, 2022, from <https://www.kemendag.go.id/id/about-us/strategic-planning/laporan-triwulan-laptri-kementerian-perdagangan-2021-triwulan-ii-1>
- Kemendag RI. (2021). Perdagangan Bilateral, RI-RRT Sepakat Gunakan Mata Uang Lokal - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/press-release/perdagangan-bilateral-ri-rrt-sepakat-gunakan-mata-uang-lokal-1>
- Kuswanti, H. (2016). Pengertian dan Penjelasan Analisis SWOT - dKampus. <https://www.dkampus.com/2016/02/pengertian-analisis-swot/>
- Malik, A. A. (2020). Politik Ekonomi Indonesia: Lanskap dan Dinamika Kontemporer. Intrans Publishing.
- Mas'ood, M. (2008). Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. Pustaka Pelajar.
- Pangastuti, T. (2022). Dipicu Perang Rusia-Ukraina, Rupiah Melemah Sepanjang Kuartal I-2022. <https://investor.id/business/290524/dipicu-perang-rusiaukraina-rupiah-melemah-sepanjang-kuartal-i2022>
- Perkasa, G. A. (2019). Hubungan Indonesia Dan Tiongkok Pasca Diluncurkannya Kebijakan Luar Negeri Belt And Road Initiative (Bri) Tahun 2013-2018. <http://elibrary.unikom.ac.id>
- Pink, B. (2022). Konflik Rusia-Ukraina Diprediksi Berdampak Terbatas ke Kurs Rupiah. <https://nasional.kontan.co.id/news/konflik-rusia-ukraina-diprediksi-berdampak-terbatas-ke-kurs-rupiah>
- Rinaldi. (2020). Mengurangi Ketergantungan Dolar AS, Baik atau Buruk? <https://news.detik.com/kolom/d-4888370/mengurangi-ketergantungan-dolar-as-baik-atau-buruk>
- Sebayang, R. (2019). Ini Alasan Negara-Negara Besar Dunia Mulai “Buang Dollar.” CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20191101111757-21-111935/ini-alasan-negara-negara-besar-dunia-mulai-buang-dollar>
- Wijayanti, Y., & Sudarmiani. (2017). Pengaruh tingkat inflasi terhadap nilai tukar rupiah (Studi pada Bank Indonesia periode tahun 2011-2015). *EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(1), 32–44. <https://doi.org/10.25273/EQUILIBRIUM.V5I1.1004>
- Wuisan. Pretty Angelia. (2021). Letter of Credit adalah: Jenis, Mekanisme, dan Manfaatnya. <https://www.modalrakyat.id/blog/letter-of-credit-adalah>
- Yovanda, Y. R. (2022). Analis Sebut Tren Dedolarisasi Jadi Tantangan Baru, Ini Dampaknya ke Stabilitas Rupiah. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/analisis-sebut-tren->

dedolarisasi-jadi-tantangan-baru-ini-dampaknya-ke-stabilitas-rupiah/ar-AA11ldkW?pfr=1&infiniteframe=4&infiniteReadingLastFrame=true

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.

Zuraya, N. (2022). Indonesia Surplus Perdagangan dengan China pada 2021 | Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/r6oiwq383/indonesia-surplus-perdagangan-dengan-china-pada-2021>

## **Efektivitas Program *Inaportnet* dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Kota Surabaya**

**Syafira Dyah Anggaraini<sup>1</sup>, Lunariana Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik,  
Universitas Hang Tuah, Indonesia

\*Corresponding author: lunariana.lubis@hangtuah.ac.id

### **Abstract**

*The increase of ship services every year needs implementation at the Port effectively. The purpose of this study was to describe and analyze the effectiveness and supporting and inhibiting factors of the Inaportnet program (online service for issuing Ship Arrival Notifications) at the Tanjung Perak Main Port Authority, Surabaya. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The theory used is a modification of the theory from Budiani and Sutrisno which said there are 6 aspects, namely Program Understanding, Target Accuracy, Timeliness, Goal Achievement, Program Monitoring, and Real Change. The results of the study showed that the effectiveness of the Inaportnet program has been running effectively. However, one aspect was found, namely the Program Understanding Level that had not run optimally. The supporting factor for the program is the ability of competent Human Resources to complete their duties. However, the service continues to run manually. This study recommends increasing the explanation of information about the program through video tutorials that are uploaded on social media.*

**Keywords:** Effectiveness, online, service, Surabaya

### **I. Pendahuluan**

Pelabuhan memegang peranan penting dalam menunjang perdagangan dan industri, selain untuk sandar kapal barang dan penumpang. Maka dari itu, gagasan *e-government* diperlukan untuk pelayanan di pelabuhan. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengembangkan sistem bernama *Inaportnet* yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelayanan Kapal melalui *Inaportnet* dalam rangka implementasi konsep *e-government*. Aplikasi *Inaportnet* pada dasarnya adalah sistem pendukung manajemen kapal. Sejak 2016, *Inaportnet* telah dimanfaatkan di Pelabuhan Tanjung Perak.

Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) yang dikeluarkan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak merupakan salah satu dari sekian banyak surat yang dibutuhkan. Surat PKK adalah dokumen penting yang harus diselesaikan sebelum kapal dapat memasuki pelabuhan, mendirikan tempat berlabuh, dan melakukan operasi lain di sana. Menurut data yang dikumpulkan oleh penulis, ada sekitar 11.000 hingga 12.000 Surat PKK yang diterbitkan setiap tahun. Melalui pemanfaatan data tersebut, kemampuan teknologi jasa kepelabuhanan perlu ditingkatkan efektivitasnya guna menjaga kesesuaiannya untuk melayani kapal baik lokal maupun asing. Untuk itu, pelayanan penerbitan surat PKK telah



dilaksanakan secara online, yang tergabung dalam program *Inaportnet* dan dapat diakses melalui website dengan alamat domain <http://Inaportnet.dephub.go.id>.

Sementara itu, pengukuran efektivitas penting untuk dilakukan dengan tujuan mengukur sejauhmana program *Inaportnet* telah berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menganalisis efektivitas program *Inaportnet* dalam pelayanan penerbitan Surat PKK serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya melalui modifikasi teori menurut Budiani dan Sutrisno (2007) dengan melihat dari pemahaman terhadap program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, pemantauan program, dan perubahan nyata.

## II. Landasan Teori

Istilah efektif adalah kata bahasa Inggris “effective” yang berarti berhasil. Hasil (outcome) dari suatu program, organisasi, atau kegiatan merupakan fokus efektivitas dapat dikatakan berhasil jika hasilnya memenuhi tujuan yang diinginkan. Tujuan mengukur efektivitas program adalah untuk memastikan seberapa baik kemajuan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Budiani (2007), untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel berikut, yaitu:

- 1) Ketepatan sasaran program
- 2) Sosialisasi program
- 3) Tujuan program
- 4) Pemantauan program

Sedangkan Sutrisno (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

- 1) Pemahaman program
- 2) Tepat sasaran
- 3) Tepat waktu
- 4) Tercapainya tujuan
- 5) Perubahan nyata

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan diatas, efektivitas program merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Peneliti menggunakan modifikasi teori pengukuran efektifitas menurut Budiani (2007) dan Sutrisno (2007) dengan variabel yaitu :

- 1) Pemahaman program
- 2) Ketetapan sasaran program
- 3) Ketepatan waktu
- 4) Tercapainya tujuan
- 5) Pemantauan program
- 6) Perubahan nyata

## III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Penelitian studi kasus bertujuan untuk melangkah lebih jauh kedalam kasus tertentu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber (Creswell, 2010). Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Program *Inaportnet*

dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap bagian-bagian penyusun suatu fenomena yang terjadi dalam objek penelitian, (2) wawancara dengan informan kunci yaitu Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut dan Petugas Jaga *Inaportnet*, wawancara dengan informan pendukung yaitu pengguna lama dan baru *Inaportnet* dan (2) dokumentasi yaitu catatan administrasi, Perundang-undangan dan dokumen relevan lainnya. Uji validitas dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instrumen akurat atau benar dalam penggunaannya sebagai alat ukur untuk variabel penelitian. Sugiyono (2017) Ketika melakukan analisis data peneliti menggunakan Model Interaktif menurut (Miles, Huberman, 2014), yaitu :

- 1) Pengumpulan data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi serta data sekunder lainnya sebagai data pendukung dari pelaksanaan observasi, wawancara dan dokumentasi pada penelitian kualitatif.
- 2) Kondensasi data dilakukan dengan pemilihan data di lapangan yang sesuai dengan topik masalah penelitian kualitatif.
- 3) Penyajian data disajikan menggunakan teks naratif dengan menampilkan hasil data penelitian kualitatif.
- 4) Penarikan kesimpulan dilaksanakan pada fase terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

Efektivitas program *Inaportnet* dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kota Surabaya menggunakan modifikasi teori menurut Budiani (2007) dan Sutrisno (2007) yaitu sebagai berikut:

##### Pemahaman Program

Menurut Sutrisno (2007) pemahaman program diartikan sebagai cara untuk melihat sejauh mana masyarakat dapat memahami program.

##### a) Tingkat Pemahaman Program

Pada pemahaman program, *Inaportnet* belum terlaksana secara maksimal, karena masih ditemukannya pengguna baru yang kesulitan beradaptasi dengan banyaknya item pelayanan serta dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi, sedangkan untuk pengguna lama sudah mampu beradaptasi karena telah terbiasa dalam melakukan pengajuan pelayanan kapal dengan menggunakan *Inaportnet*.

##### b) Sosialisasi Program dan pelatihan

Sosialisasi yang diberikan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan Utama yang bekerja sama dengan petugas dari kantor pusat berjalan dengan baik, dikarenakan kegiatan tersebut memberi dampak positif kepada para pengguna jasa dalam memahami alur penggunaan *Inaportnet*.

##### Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran sangat diperlukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program sesuai dengan tingkat kebutuhan dan harapan masyarakat.

- a) Kesesuaian program, Kriteria penerima program tertera dalam Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelayanan Kapal Melalui *Inaportnet* yaitu harus memiliki ijin akses yang telah disetujui oleh penyelenggara pelabuhan. Pelayanan penerbitan Surat PKK melalui program *Inaportnet* sudah tepat sasaran, dibuktikan dari para pengguna program diberi kemudahan untuk melakukan pengajuan dan juga telah sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah.
- b) Kepuasan Pengguna Jasa  
Kepuasan dapat dilihat dari aspek persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, perilaku pelaksana yang sudah efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam menjaga kualitas pelayanan publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh 86,06 persen.

### **Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu merupakan penyelesaian setiap jenis pelayanan yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. Standar waktu penyelesaian pelayanan penerbitan surat PKK tertera dalam SE Dirjen Perhubungan Laut Nomor Um.002/87/18/DJPL-16. Penyelesaian pelayanan penerbitan surat PKK dalam program *Inaportnet* sudah tepat waktu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dapat dilihat dari waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan yang hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Kendala dan hambatan teknis dapat terjadi, namun masih dapat diatasi.

### **Tercapainya Tujuan**

Tercapainya tujuan merupakan penilaian sejauhmana kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang sebelumnya telah ditetapkan. Tujuan utama diterapkannya program *Inaportnet* tertera dalam PERMENHUB No. PM 157 Tahun 2015 bahwa, “dalam rangka memberikan pelayanan kapal dan barang secara efektif dan efisien yang melibatkan instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan melalui sistem layanan tunggal berbasis internet secara terintegrasi.” Aspek ini sudah terlaksana dengan baik dan efektif, dilihat dari pegawai sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pengguna sangat terbantu dengan pelayanan yang mudah diakses dan membutuhkan waktu yang cukup singkat, sehingga tidak menimbulkan antrian pada loket pelayanan karena pelayanan dapat dilakukan melalui *website* yang bisa diakses dimana dan kapan saja.

### **Pemantauan Program**

Pemantauan program memiliki tujuan untuk mengetahui perkembangan dan juga kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta cara mengantisipasi atau upaya pemecahan apabila ditemukannya hambatan dalam implementasi program.

- a) Intensitas Pengawasan.  
Kegiatan ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi perkembangan dari pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Kegiatan pengawasan pelaksanaan *Inaportnet* sudah berjalan dengan baik dan efektif dikarenakan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak menyediakan layanan dan petugas jaga selama 24 jam untuk melaksanakan kegiatan pemantauan secara berkala untuk tetap menjaga kelancaran pengajuan pelayanan.
- b) Intensitas pendampingan dan pembinaan  
ditinjau dari sejauhmana pelaksana program *Inaportnet* tersebut dalam melakukan pendampingan dan pembinaan untuk masyarakat sebagai pengguna jasa.

Pendampingan dan pengawasan dilakukan dengan adanya rapat evaluasi rutin setahun sekali antara pelaksana dan pengguna terhadap pelaksanaan program selama setahun. Intensitas pendampingan dan pembinaan berjalan dengan efektif. Hasil pendampingan dan pembinaan tersebut dapat dijadikan bahan informasi untuk mengetahui perkembangan pelayanan program.

### **Perubahan Nyata**

Perubahan nyata yang dimaksud mengidentifikasi kemungkinan dampak dan perubahan nyata yang dapat dimiliki oleh program *Inaportnet* terhadap pihak-pihak terkait. Perubahan Kondisi pelayanan dilakukan dengan melakukan perbandingan kondisi pelayanan sebelum dan sesudah implementasi *Inaportnet* di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak. Berdasarkan temuan di lapangan, pelayanan surat PKK menggunakan *Inaportnet* perubahan yang nyata dalam mempermudah pengguna jasa untuk melakukan pengajuan pelayanan kapal. Pelayanan menjadi jauh lebih efektif karena program *Inaportnet* dapat memangkas waktu pelayanan dan pengguna jasa tidak perlu mengantri lagi untuk menyelesaikan pengajuan pelayanan kapal.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat**

#### **a) Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kemampuan petugas *Inaportnet* yang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Mereka dapat menyelesaikan proses pelayanan dengan cepat dan dapat membantu pengguna jasa dalam mengatasi hambatan atau kendala yang terjadi. Faktor pendukung selanjutnya adalah konsistensi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak dalam memberikan pelayanan yang dibuktikan dari saat terjadi kendala teknis pada sistem dan jaringan *Inaportnet* yang mengakibatkan pelayanan menjadi terhambat, petugas *Inaportnet* tetap memberi pelayanan walaupun harus dilakukan secara manual. Program *Inaportnet* juga telah memiliki standar pelayanan yang jelas sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, yaitu sebagai berikut: a) PERMENHUB No. PM 157 Tahun 2015; b) PERMENHUB No. PM 8 Tahun 2022; c) SE DIRJEN Perhubungan Laut Nomor UM.002/87/18/DJPL-16. Kemudahan akses pada proses pengajuan pelayanan seperti dapat dilakukan dimana dan kapan saja melalui *website* yang dapat diakses melalui *handphone* dan komputer pengguna jasa juga menjadi faktor pendukung.

#### **b) Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam pelayanan surat PKK dalam program *Inaportnet* adalah belum adanya sosialisasi berupa video yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak untuk pengguna jasa sehingga sewaktu-waktu pengguna jasa dapat melihat ulang video tersebut jika menemukan kesulitan dalam penggunaan *Inaportnet*. Juga, terkadang masih terjadi kendala teknis pada sistem dan jaringan *Inaportnet* sehingga pengguna tidak dapat mengakses *Inaportnet*.

### **V. Kesimpulan dan Saran**

Menurut hasil penelitian serta pembahasan yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas program *Inaportnet* dalam pelayanan penerbitan surat Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) di Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak kota Surabaya telah terlaksana dengan efektif, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yaitu belum adanya kegiatan sosialisasi berupa video yang dilakukan dan

terkadang masih terjadi kendala teknis pada sistem dan jaringan *Inaportnet* sehingga pengguna tidak dapat mengakses *Inaportnet*.

### Saran

Penelitian ini menyarankan agar ditingkatkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan melalui tayangan video tutorial di sosial media agar pengguna dapat memutar ulang sewaktu-waktu jika dibutuhkan, meningkatkan kualitas sistem pada website sehingga meminimalkan kendala yang terjadi demi kelancaran arus perdagangan lalu lintas kapal di pelabuhan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun (2022).
- Indonesia. PM\_157\_Tahun\_2015, (2015).
- Indonesia. SLS *INAPORTNET*, (2016).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (2008).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (2008).
- Malisan, J., & Tresnawati, W. (2019). mplementasi *Inaportnet* dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. *Warta Penelitian Perhubungan*, 31(2), 67-74. <https://doi.org/10.25104/warlit.v31i2.1267>
- Nurul SW , Lunariana L, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penerbitan SPB Online – Nurul SW, Lunariana L , Yuliansyah.5(1), 1–16.
- Polii, S. A. P. (2021). Efektivitas Informasi Pelayanan Perizinan Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpm-Ptsp) Kota Manado. *Jurnal Politico*, 10(4).
- Savinatunazah, V. (2019). Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Adminisitrasi Negara*, 6(2), 70–77. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/2276>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2007). *Manajemen SumberDaya Manusia*. Kencana Jl. Tambora Raya No,23 Rawa Mangun :Jakarta.
- W.Creswell, J. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif,Kuantitatif,Dan Mixed*. 175–176.

## Pengaruh Hardskill dan Softskill Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Solindo Tama Jaya

Erika Febriari Saputri<sup>1\*</sup>, Moeheriono<sup>2</sup>, Winarto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Bisnis,  
Universitas Hang Tuah, Indonesia

\*Corresponding author: [erikafebriaris@gmail.com](mailto:erikafebriaris@gmail.com)

### Abstract

*Various countries are experiencing many changes in the economic field that caused by Covid-19, which has made the economy unstable, including Indonesia. Companies experience the impact of this pandemic that continues to do business despite of the downturn. For the cost of human resources, companies must choose those who have good performance and skills that are in accordance with the company. This study aims to determine the effect of hard skills on the performance of employees of PT. Solindo Tama Jaya, the effect of soft skills on the performance of employees of PT. Solindo Tama Jaya, the effect of hard skills and soft skills on the performance of employees of PT. Solindo Tama Jaya. This study uses a quantitative method with an associative approach. This type of research uses explanatory research. The sample in this study amounted to 93 employees using simple random sampling. This research is categorized in a research questionnaire with research instruments in the form of using validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regressions, t tests, F tests, coefficient correlation (R) and coefficient determination (R<sup>2</sup>). The results of multiple linear regression tests that the t test partially hard skills have a significant positive effect on employee performance evidenced by t count 6.640 with a significance value of 0.000, soft skills have a significant positive effect on employee performance as evidenced by t count 2.716 with a significance value of 0.008, and the F test is evidenced by the results of hard skills and soft skills having a positive effect on employee performance with an F value of 29.394 with a significance of 0.000. Value coefficient correlation (R) 0.629 or 62,9% and coefficient determination (R<sup>2</sup>) 0.382 or 38,2%.*

**Keywords:** *hardskill, softskill, employee performance*

### I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan potensi ekonomi yang tinggi dan mulai menarik perhatian dunia internasional. Perkembangan perekonomian dunia saat ini yang diiringi dengan teknologi yang semakin maju, dengan hal tersebut maka perusahaan perlu lebih meningkatkan kualitas produknya dengan tidak meninggalkan mutu dari bahan bakunya sendiri. Secanggih apapun peralatan dan perangkat yang ada apabila tidak ditunjang dengan sumber daya manusia untuk mengendalikan dan mengoperasikannya, maka peralatan dan perangkat tersebut tidak mungkin dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Saat ini berbagai negara sedang mengalami banyak perubahan di bidang ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19 (corona virus), yang membuat perekonomian tidak stabil termasuk negara Indonesia. Pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Perusahaan yang mengalami dampak dari pandemi ini dapat terus melanjutkan



usaha meskipun mengalami penurunan. Hanya saja perusahaan perlu untuk mengurangi beban biaya semaksimal mungkin agar perusahaan tetap mendapatkan laba.

Meminimalkan biaya sumber daya manusia perusahaan harus memilih karyawan dengan kinerja yang baik dan memiliki skills yang sesuai dengan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi yang memiliki pengaruh dominan terhadap faktor produksi lain seperti mesin, modal, material, dan metode (Anwar, 2010). Faktor inilah yang dipandang membutuhkan kemampuan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan disamping faktor lain seperti modal oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi (Hariandja, 2012). Skill atau keahlian terdiri dari 2 macam, yakni *hardskill* dan *softskill*. Adapun bentuk definisi lain dari *hardskill* yang mengartikan bahwa kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. *Softskill* sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Dunia kerja tidak hanya memprioritaskan pada kemampuan akademik (*hardskill*) yang tinggi saja, tetapi juga memperhatikan kecerdasan sosial dalam hal nilai-nilai yang melekat pada seseorang atau sering dikenal dengan aspek *softskill*. *Softskill* adalah keterampilan seseorang dalam mengatur dirinya sendiri (*intrapersonal skills*) dan keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain (*interpersonal skills*) yang mampu mengembangkan pekerjaan secara maksimal (Sailah, 2008).

## II. Landasan Teori

### Hardskill

*Hardskill* disebut dengan kemampuan intelektual (*intellectual ability*). Kemampuan intelektual (*intellectual ability*) adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menentukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar, dan memecahkan masalah (Robbins, 2014). *Hardskill* adalah pengetahuan dan kemampuan teknis yang dimiliki seseorang (Islami, 2012).

### Softskill

*Softskill* adalah keterampilan lunak yang artinya keterampilan yang digunakan dalam hubungan kerjasama dengan orang lain (Robbins, 2014). *Softskill* adalah seluruh aspek dari *generic skill* yang juga termasuk elemen-elemen kognitif yang berhubungan dengan *non-academic skills* (Sharma, 2009).

### Kinerja Karyawan

Kinerja Karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2014). Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono, 2012).

**Tabel 1 Definisi Variabel**

No	VARIABEL	INDIKATOR
1.	<i>Hardskill</i> (Robbins, 2014)	-Kecerdasan Angka -Pemahaman Verbal -Kecepatan Persepsi -Penalaran Induktif -Penalaran Deduktif

		-Visualisasai Spasial -Daya Ingat
2.	<i>Softskill</i> (Robbins,2014)	-Kesadaran Diri -Kecepatan Diri -Motivasi Diri -Empati -Keterampilan Sosial
3.	Kinerja Karyawan (Mangkunegara,2014)	-Kuantitas -Kualitas -Kerjasama -Inisiatif

### III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif (Sugiyono, 2016), Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanasi (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan kuesioner di PT.Solindo Tama Jaya.

### IV. Hasil dan Pembahasan

#### Uji Validitas

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas**

Item	Variabel	$r_{hitung}$	Signifikansi	Keterangan
X1.1	<i>Hardskill</i>	0,677	0,000	Valid
X1.2		0,758	0,000	Valid
X1.3		0,692	0,000	Valid
X1.4		0,593	0,000	Valid
X1.5		0,569	0,000	Valid
X1.6		0,509	0,000	Valid
X1.7		0,354	0,002	Valid
X2.1	<i>Softskill</i>	0,665	0,000	Valid
X2.2		0,756	0,000	Valid
X2.3		0,772	0,000	Valid
X2.4		0,840	0,000	Valid
X2.5		0,802	0,000	Valid
Y1.1	Kinerja Karyawan	0,752	0,000	Valid
Y1.2		0,908	0,000	Valid
Y1.3		0,899	0,000	Valid
Y1.4		0,838	0,000	Valid

Sumber: Data diolah penulis (2021)

Menunjukkan bahwa untuk masing-masing item pernyataan dari variabel penelitian yang terdiri dari *Hardskill*, *Softskill* dan kinerja karyawan memperoleh nilai signifikansi < 0,05.

## Uji Reliabilitas

**Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
<i>Hardskill</i>	0,684	Reliabel
<i>Softskill</i>	0,825	Reliabel
Kinerja karyawan	0,871	Reliabel

*Sumber: Data diolah penulis (2021)*

Hasil uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha* diketahui variabel instrumen memiliki *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6. Dengan demikian seluruh instrumen dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

## Uji Asumsi Klasik

### (1). Uji Normalitas

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas**

Unstandardized Residual	Signifikansi
	0,200

*Sumber: Data diolah penulis (2021)*

Diketahui bahwa nilai signifikansi atau *Asymp. Sig. (2 tailed)* sebesar 0,200 atau  $> 0,05$ . Artinya model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas atau data terdistribusi normal.

### (2). Uji Multikolinieritas

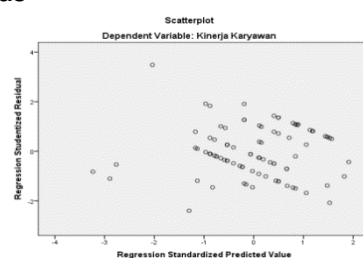
**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)					
Hard Skill	,588	,573	,544	,974	1,027
Soft Skill	,314	,275	,223	,974	1,027

*Sumber: Data diolah penulis (2021)*

Diperoleh hasil bahwa nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sedangkan nilai VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat diketahui bahwa model regresi dalam penelitian ini terhindar dari gejala Multikolinearitas.

### (3). Uji Heteroskedastisitas



*Sumber : Data diolah penulis (2021)*

Gambar di atas *scatter plot* terlihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak ada kecenderungan untuk membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### (4). Uji Linieritas

**Tabel 6 Hasil Uji Linieritas**

Variabel	<i>Linearity</i>	<i>Deviation from Linearity</i>	Keterangan
<i>Hardskill</i> ( $X_1$ )	0,000	0,315	Linier
<i>Softskill</i> ( $X_2$ )	0,001	0,206	Linier

Sumber: Data diolah penulis (2021)

Diketahui semua variabel mempunyai nilai *Linearity* lebih dari 0,05 dan *Deviation from Linearity* lebih dari 0,05. Artinya terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat, atau memenuhi asumsi linieritas.

#### Regresi Linier Berganda

**Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	1,323	2,091	
	Hard Skill	,431	,065	,552
	Soft Skill	,160	,059	,226

Sumber: Data diolah penulis (2021)

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 1,323. Artinya tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas yaitu *Hardskill* dan *Softskill* nilai variabel terikat yaitu kinerja karyawan tetap konstan sebesar 1,323.
- 2) Nilai koefisien variabel *Hardskill* sebesar 0,431 dengan nilai positif. Artinya setiap kenaikan satu satuan variabel *Hardskill* akan berdampak pada kenaikan variabel kinerja karyawan sebesar 0,431 dengan asumsi faktor lainnya konstan atau tetap.
- 3) Nilai koefisien variabel *Softskill* sebesar 0,160 dengan nilai positif. Artinya setiap kenaikan satu satuan variabel *Softskill* akan berdampak pada kenaikan variabel kinerja karyawan sebesar 0,160 dengan asumsi faktor lainnya konstan atau tetap.

#### Uji Hipotesis

##### (1). Uji Parsial

**Tabel 8 Hasil Uji Parsial  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Standardized Coefficients	T	Sig.
	Beta		
1 (Constant)		,633	,529
Hard Skill	,552	6,640	,000
Soft Skill	,226	2,716	,008

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber : diolah oleh penulis (2021)

*Hardskill*, memperoleh nilai  $t_{hitung}=6,640 > t_{tabel}= 1,98667$  dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya variabel *Hardskill* secara parsial berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan di PT.Solindo Tama Jaya, atau  $H_1$  diterima dan menolak  $H_0$ .

*Softskill*, memperoleh nilai  $t_{hitung}=2,716 > t_{tabel}= 1,98667$  dengan signifikansi sebesar  $0,008 < 0,05$ . Artinya variabel *Softskill* secara parsial berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan di PT.Solindo Tama Jaya, atau  $H_1$  diterima dan menolak  $H_0$ .

## (2). Uji Simultan

**Tabel 9 Hasil Uji Simultan  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	144,534	2	72,267	29,394	,000 <sup>b</sup>
Residual	221,272	90	2,459		
Total	365,806	92			

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

b. Predictors: (Constant), *Soft Skill*, *Hard Skill*

Sumer diolah oleh penulis (2021)

Berikut hasil Uji Simultan (F) dapat disimpulkan bahwa: diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $29,394 > F_{tabel}$  sebesar 3,10 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya secara simultan variabel *Hardskill* dan *Softskill* berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, atau  $H_1$  diterima dan menolak  $H_0$ .

## Uji Koefisien Korelasi Berganda (R)

**Tabel 10 Hasil Koefisien Korelasi Berganda  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,629 <sup>a</sup>	,395	,382	1,56799

a. Predictors: (Constant), *Soft Skill*, *Hard Skill*

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Sumber diolah oleh penulis (2021)

Berikut hasil Koefisien Korelasi Berganda dapat disimpulkan: diperoleh nilai ( $R$ ) sebesar 0,629 atau 62,9%. Demikian bahwa *Hardskill* dan *Softskill* secara simultan bersama-sama mempunyai hubungan yang kuat dan searah dengan kinerja karyawan.

#### (1). Uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ )

Berikut hasil Koefisien Determinasi Berganda dapat disimpulkan: diperoleh nilai ( $R^2$ ) dari *Adjusted R Square* sebesar 0,382 atau 38,2%. Menunjukkan bahwa variabel bebas *Hardskill* dan *Softskill* sebesar 38,2% mempengaruhi variabel terikat Kinerja Karyawan.

### V. Kesimpulan dan Saran

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan seperti dibawah ini:

- 1) Menerima Hipotesis satu variabel *hardskill* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan pada PT.Solindo Tama Jaya.
- 2) Menerima Hipotesis dua variabel *softskill* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan pada PT.Solindo Tama Jaya.
- 3) Menerima Hipotesis tiga variabel *hardskill* dan *softskill* berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan pada PT.Solindo Tama Jaya.

#### Saran

Perusahaan perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada setiap karyawan terkait tujuan perusahaan, agar menumbuhkan rasa yang tinggi dalam diri karyawan. PT.Solindo Tama Jaya harus mengutamakan karyawannya daripada produktivitas perusahaan sendiri dalam hal itu karyawan yang memiliki *hardskill* maupun *softskill* yang baik bisa memaksimalkan kinerjanya dalam mengembalikan produktivitas perusahaan dalam masa pandemi Covid-19. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa berkembang lebih baik lagi melalui penggunaan teori *hardskill* dan *softskill* terhadap kinerja karyawan. Hasil Uji Koefisien Determinasi Berganda ( $R^2$ ) sebesar 0.382 atau 38,2% menunjukkan masih ada variabel-variabel lain yang direkomendasikan dalam penelitian selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hariandja, 2012, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Illah Sailah. 2008. Pengembangan Soft Skills Di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Diunduh dari <http://isailah.50webs.com/buku%20pengembangan%20softskills%202008.pdf> Diakses pada tanggal 12 April 2017, Jam 12.42 WIB.
- Islami, Faizal Alam. 2012. Analisis Pengaruh Hard Skill, Soft Skill, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Tenaga Penjualan (Studi Pada Tenaga Kerja Penjualan Pt. Bumiputera Wilayah Semarang). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Moeheriono. 2012. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Robbins, Stephen P and Judge, terjemahan Benyamin Molan. 2014. Perilaku Organisasi Buku



2. Jakarta : Ufuk Timur

Sharma. 2009. Analisis Faktor Kompetensi Softskills Mahasiswa Yang Dibutuhkan Dunia Kerja Berdasarkan Persepsi Manajer dan Hrd Perusahaan. Skripsi. Universitas Bakrie.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

## Kemitraan Pemerintah dan Swasta Tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Tenaga Listrik dengan Program *Zero Waste City* di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah/Pltsa Benowo, Surabaya

Borhanudin Achmad Safi<sup>1</sup>, Mas Roro Lilik Ekowanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik,  
Universitas Hang Tuah, Indonesia

\*Corresponding author: lilik.ekowanti@hangtuah.ac.id

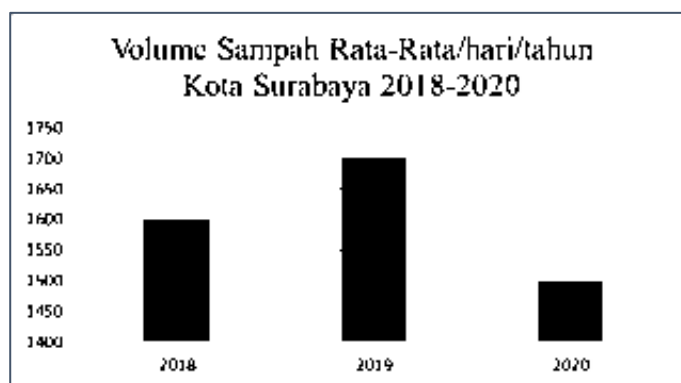
### Abstract

*In an effort to reduce the volume of waste and to create a clean city, Surabaya City Government conducted a private-government partnership. The partnership exists between the Green Open Space Cleaning Institution (DKRTH) and PT. Sumber Organik (SO). They use Build Operate Transfer Cooperation Model to change the waste into electricity energy at Benowo, Surabaya City. This partnership aims to overcome the waste problem in Surabaya. This research uses qualitative method with data collection techniques of interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the government-private partnership between DKRTH and PT. SO in managing waste into electricity at PLTSa Benowo Surabaya City has been done effectively. There are 3 aspects that have been effective, namely monitoring and implementation of partnerships, negotiation processes and equal roles, but the aspects that have not been effective are transparency and commitment. In this case the author provides recommendations to pay more attention to the public to get an information about the management become electricity at PLTSa Benowo. Besides that, it needs to improve the management more transparent to the public and to increase the public trust to the partnership*

**Keywords:** Partnership, Waste Management, Surabaya

### I. Pendahuluan

Kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia yang menunjukkan kepadatan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Penduduk Surabaya berkembang sangat pesat setiap tahunnya karena berbagai faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial, di antaranya adalah kerusakan lingkungan, pemukiman padat penduduk dan aturan kebersihan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah lingkungan. (Wiryono, PH, 2013).



Gambar 1 Volume sampah Kota Surabaya

Berdasarkan data pada tahun 2018 volume sampah yang dihasilkan warga Surabaya mencapai 1600 ton/hari dan mengalami peningkatan 1000 ton ditahun 2019. Namun memasuki tahun 2020 volume sampah menurun menjadi 1500ton/hari. Penurunan volume sampah Surabaya sudah termasuk keseluruhan sampah yang ada di PLTSA, baik yang dibuang oleh pemerintah, swasta, masyarakat. Sekitar 20% sampah mengalami penurunan perhari. Walaupun sampah turun dalam perharinya perlu dilakukannya upaya dan inovasi untuk menekan jumlah sampah dengan berbagai pemanfaatan dan kreatifitas yang diperlukan. (Pemerintah Kota Surabaya, 2021).

Dalam mengatasi masalah anggaran pemerintah melakukan upaya berupa pola kerjasama yang dinamakan Kerjasama Pemerintah Swasta. Pola ini memberikan keuntungan dan manfaat bagi para pihak sehingga dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan modal yang tidak dimiliki Pemerintah. Kemitraan Pemerintah Swasta, dengan fokus kajian tata ruang model kerjasama Build Operate Transfer (BOT), yaitu bentuk perjanjian kebijakan yang diadakan oleh pemerintah dengan pihak swasta merupakan perbuatan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang menjadikan kebijakan publik sebagai objek perjanjian. dalam pengelolaan sampah gerakan pemilahan dan daur ulang sampah belum mampu mengurangi sampah secara signifikan. Oleh karena itu, perlu diterapkannya teknologi pengolahan sampah yang dapat mengolah sampah secara cepat, signifikan dan ramah lingkungan. Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai Perpres No. 58/2017 tentang Proyek Infrastruktur Strategis Nasional. Dalam implementasinya, diatur dalam Perpres No. 35/2018, tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Perpres Nomor 35 Tahun 2018, n.d.)

Pengelolaan sampah yang masih menggunakan program lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) berdampak buruk. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, terutama kesulitan mendapat tempat pembuangan akhir serta berkembangnya jumlah dan ragam sampah diperkotaan. Guna mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode baru bernama *Zero waste City*, yang saat ini sedang dikembangkan di banyak kota di Indonesia. Surabaya mulai menerapkan program *zero waste city*, dengan menyerukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Himbauan itu dipakai untuk menindaklanjuti Perda Kota Surabaya No. 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Kota Surabaya No. 5 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Surabaya dan upaya pengendalian sampah (Suhendra et al., 2020).

Program *Zero waste City* ini diterapkan di Surabaya melibatkan masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah yaitu dengan implementasi Reuse, Reduce, dan Recycle (3R), dan program ini cukup efektif untuk mengurangi sampah yang masuk hingga 20%. (Hidayah et al., 2020). Berdasarkan latar belakang diatas, menunjukkan strategi Kemitraan Pemerintah dan Swasta untuk mengatasi masalah pengolahan sampah di TPA Benowo, Kota Surabaya dengan menggunakan model Build Operate Transfer (BOT). Pelaksananya adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dengan pihak swasta PT. Sumber Organik yang berjalan sesuai Kesepakatan. PT. Sumber Organik mempunyai wewenang penuh dalam mengelola PLTSa Benowo selama 20 tahun dan akan kembali kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan ketika kontrak sudah selesai.

## II. Landasan Teori

### Kemitraan Pemerintah-Swasta

Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Perlunya kemitraan tersebut dijelaskan oleh fakta bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas, baik dari segi sumber daya manusia, keuangan, dan dukungan lainnya (Mulyani.S, 2017). Konsep kemitraan antara pemerintah dan swasta tidak dapat dihindari. Kemitraan dianggap sebagai langkah penting bagi para pemangku kepentingan. Perubahan pemerintahan akan lebih terbuka, mengarah pada konsep kemitraan yang melibatkan sektor swasta dalam program program pembangunan. (Murtadho & Rozqin, 2018).

Menurut Leonhardt dalam jurnal (Pradana, 2020) terdapat 4 prinsip keberhasilan dalam menjalankan kemitraan pemerintah swasta antara lain:

- a) Transparansi dan komitmen
- b) Pengawasan pelaksanaan kemitraan
- c) Proses negosiasi
- d) Kesenjangan peran dalam Kemitraan

### Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yaitu mengumpulkan sampah dari berbagai tempat ke suatu tempat pengumpulan sampah, kemudian memisahkan sampah menurut jenisnya, lalu langkah berikutnya dilakukan pembuangan akhir atau pemusnahan sampah (Suhendra et al., 2020). Menurut UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat 2 kelompok utama pengelolaan sampah, yaitu Pengurangan sampah (*waste minimization*), yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah R1), guna ulang (R2) dan daur ulang (R3), Penanganan sampah (*waste handling*), yang terdiri dari, Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18, 2008).

### Program Zero waste City

*Zero waste* adalah salah satu konsep paling progresif dalam pengelolaan sampah. Kota kota besar dunia, seperti Adelaide, San Francisco dan Stockholm, mendeklarasikan diri mereka bebas sampah dan berusaha menjadi yang pertama untuk mencapai tujuan mereka dan menerapkan rezim tanpa sampah. Namun, penerapan konsep *Zero waste* pada sebuah kota juga tidak kalah pentingnya dan bagaimana mengukur kinerja kota berdasarkan konsep *Zero*.

### III. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena untuk memperoleh pandangan secara luas yang digambarkan, dijelaskan, dan diungkapkan mengenai fakta di lapangan. Fokus pada Kemitraan pemerintah dan swasta antara pemerintah kota Surabaya yang diserahkan pada Dinas Kebersihan ruang terbuka hijau Kota Surabaya dengan PT. Sumber Organik untuk mengelola pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya. Lokasi penelitian ini dipilih untuk kesesuaian dengan topik penelitian. Adapun memilih objek tersebut untuk melihat bentuk kerjasama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik yang dilaksanakan di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

Adapun dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sebagai informan yaitu Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau beserta pegawainya dan Divisi Staf dari PT. Sumber Organik di PLTSa Benowo kota Surabaya Untuk mendapatkan keseluruhan informasi dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta melalui sumber tertulis berupa buku, literatur, studi pustaka, surat kabar, karya ilmiah dan lain sebagai sebagainya. Teknik keabsahan data Pada penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi Uji Credibility (Validitas internal), Transferability (Validitas eksternal), Dependability (Reliabilitas), dan Confirmability (Obyektivitas) (Sugiyono, 2011). Proses analisa data interaktif dilandaskan menurut konsep Miles, Huberman dan Saldana (2014:14) meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, hingga verifikasi data. Pada penelitian ini Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menunjang segala data dan informasi.

### IV. Hasil dan Pembahasan

PLTSa Benowo menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang terbesar dan pertama di Indonesia. PLTSa Benowo merupakan salah satu bentuk pengembangan pembangkit listrik energi baru terbaru yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. PLTSa pertama di Indonesia yang menggunakan konsep *Zero waste* ini berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (PLTSA) Benowo, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Jawa Timur.

PLTSa Benowo terletak didekat Stadion Gelora Bung Tomo kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan kabupaten Gresik, luas lahan PLTSa mencapai 22 Hektar yang digunakan untuk area pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik dari bahan produksi utama sampah yang telah dikumpulkan dari seluruh Kota Surabaya yang dipusatkan di PLTSA Benowo sebagai tujuan akhir dalam mengurai sampah. Sedangkan, luas lahan PLTSA Benowo mencapai 37,4 Hektar dengan volume rata rata 1600 Ton perhari sampah yang dibuang di PLTSA Benowo dan rata rata 1000 Ton perhari diambil PLTSa sebagai bahan produksi utama untuk proses gasification power plant dan 400 600 ton untuk landfil gas power plant. PLTSa Benowo ini adalah hasil kerja sama antara DKRTH Kota Surabaya dengan PT.Sumber Organik.

#### Transparansi dan Komitmen

Terjaminnya akses kebebasan bagi setiap pihak. Akses kebebasan informasi yang ada di PLTSa Benowo Kota Surabaya pihak pemerintah dan pihak swasta telah menyediakan akses kebebasan dalam memperoleh informasi pengelolaan sampah di PLTSa Benowo dengan ketentuan prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah.

Frekuensi pelaporan Pengelolaan Pihak swasta yang bertanggung jawab dalam pengelolaan harus melaporkan kepada pihak pemerintah sebanyak 3x dalam 1 tahun yang terbagi dalam 3 bulan, 6 bulan, dan 1tahun dengan penyajian Ritase harian, jumlah bahan

untuk produksi tenaga listrik, hasil produksi listrik, penumpukan sampah dalam setiap pelaporan.

Komitmen Kemitraan Perjanjian kemitraan ini telah didasari dengan MOU Nomor :658.1/4347/436.6.5/2012±Nomor :88/JBU-SO/8/201, Tanggal 8 Agustus 2012. yang telah disepakati dan berkomitmen untuk memanfaatkan sampah yang sulit untuk diurai dan dijadikan sebagai bahan utama energi listrik yang dijual kepada PLN.

#### **Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan**

Kontrol Pelaksanaan Pihak pemerintah maupun swasta bekerja sama untuk mengontrol pelaksanaan pengelolaan sampah agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan jika terjadi kendala maka diselesaikan secara bersama dan profesional agar tidak saling merugikan satu sama lain. Mengatur pendapatan dan pengeluaran Masing-masing pihak pemerintah maupun swasta telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk biaya operasional pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

Identifikasi mekanisme penggunaan prasarana Pihak pemerintah yang berperan sebagai penyedia infrastruktur dan pihak swasta yang sepenuhnya mengelola PLTSa seperti memperbaiki prasarana lama dan membangun prasarana baru sesuai kebutuhan pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

#### **Proses Negosiasi**

Negosiasi Kemitraan Pemkot Surabaya kesulitan dalam anggaran dana yang harus menggandeng pihak ketiga untuk melakukan kemitraan dengan PT.Sumber Organik sebagai pemenang tender.

#### **Kesetaraan peran dalam Kemitraan**

Pembagian Peran Pembagian peran antara DKRTH dengan PT.Sumber Organik sebagai pihak yang menjalankan kemitraan pemerintah swasta sudah setara untuk menjalankan progres pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya. Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dilakukan bersama dalam membuat suatu forum yang dihadiri oleh beberapa pihak yang bersangkutan dalam kemitraan pemerintah swasta untuk pengelolaan PLTSa Benowo untuk menghadapi kendala kendala yang terjadi dalam pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

#### **V. Kesimpulan dan Saran**

Kerjasama pemerintah swasta dalam kontrak atau *Build Operate Transfer* (BOT) telah dilaksanakan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah di TPA Benowo diperbarui menjadi Pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik untuk mengurangi volume sampah yang digunakan sebagai bahan dasar untuk sumber energi listrik. Kemitraan yang terjalin antara DKRTH dan PT.Sumber Organik dalam pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di PLTSa Benowo telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh kemitraan.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan kurangnya transparansi yang dilakukan dalam kemitraan oleh pemerintah belum dilaksanakannya good governance karena informasi dalam kemitraan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan dalam hal pengawasan pihak pemerintah menugaskan untuk tim monitoring supaya memantau kinerja PT.Sumber Organik dalam mengelola PLTSa Benowo. Proses negosiasi yang ditawarkan juga menarik dan saling menguntungkan untuk menjalin sebuah kemitraan dengan kesetaraan peran yang seimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam hal pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara DKRTH dengan PT.Sumber Organik dalam mengelola sampah di PLTSa Benowo sudah



berhasil karena volume sampah Kota Surabaya dapat menurun akibat pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik dan tidak ada bau sampah yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Akan tetapi, program *zero waste* ini tidak aktif di PLTSa Benowo dan hanya sebagai acuan dalam pengelolaan sampah yang menggunakan teknologi gasification power plant supaya dapat mendaur ulang sampah dengan maksimal.

### Saran

Pihak pemerintah maupun swasta lebih memperhatikan masyarakat supaya bisa mengakses informasi mengenai pengelolaan sampah di PLTSa Benowo untuk lebih transparansi kepada masyarakat; Melebarkan akses jalan menuju ke PLTSa Benowo karena truk sampah yang berkapasitas banyak dan sering keluar masuknya truk serta saling bersimpangan agar dapat melancarkan proses pengiriman sampah ke PLTSa Benowo; Memperhatikan mesin produksi untuk menghasilkan energi listrik dengan cara membuat jadwal maintenance secara berkala untuk menghindari kerusakan mesin dan membuat kelancaran dalam pekerjaan; penelitian selanjutnya untuk tidak mengkaji tentang program *zero waste* di PLTSa Benowo karena program tersebut tidak aktif dan saya sarankan untuk mengkaji tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya dengan studi pengelolaan kemitraan antara DKRTH Kota Surabaya dengan PT.Sumber Organik di PLTSa Benowo Kota Surabaya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayah, N. laily, Kushardjo, B., & Murti, I. (2020). Efektivitas Penerapan Program Zero Waste City di Kota Surabaya.
- Mulyani.S. (2017). "Pengelolaan Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang."
- Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Daerah, 1, 37–45.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31002/jpalg.v1i1.443>
- Murtadho, I., & Rozqin, A. (2018). "Public Governance Perspective to Adressing Development Problems in Surabaya City." 241(IcoSaPS), 109–114. <https://doi.org/10.2991/icosap.s.18.2018.26>
- Pemerintah Kota Surabaya. (2021). Peringati HPSN Tahun 2021, Pemkot Surabaya Terima Penghargaan Kinerja Pengurangan Sampah dari KLHK. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/58910/peringati-hpsn-tahun-2021>
- Perpres Nomor 35 Tahun 2018. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73958/perpres-no35-tahun-2018>
- Pradana, A. E. (2020). Kerjasama pemerintah swasta dalam rangka pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik di TPA Jatibarang kota Semarang. 3(2), 130–144.
- Sugiyono. (2011). Metoda Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabeta.
- Suhendra, A. D., Asworowati, R. D., & Ismawati, T. (2020). "Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram [Universitas Muhammadiyah Mataram]." Akrab Juara (Vol.5, Issue1). <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>
- Surabaya, L. B., Pusat, B., Kota, S., Penduduk, J., Surabaya, K., & Surabaya, P. K. (2016). No Title. 1–12.
- UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18. (2008).
- Wiryono, PH, D. (2013). "Pengantar Ilmu Lingkungan." pertelin media. <http://repository.unib.ac.id/20386/1/pengantar-ilmu-lingkungan-wiryono-online.pdf>

## Penilaian Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Menggunakan *Risk based capital*

Nurul Nabila Batin<sup>1</sup>, Sri Hartati Setyowarni<sup>2</sup>, Herman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Bisnis  
Universitas Hang Tuah, Indonesia

\*Corresponding author: [nabila.fisip18@hangtuah.ac.id](mailto:nabila.fisip18@hangtuah.ac.id)

### Abstract

*The purpose of this study is to assess the financial health of insurance companies for the 2018-2020 period listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) using the risk-based capital method. This type of research uses a descriptive analysis method with a quantitative approach, with indicators of allowable assets, liabilities (liabilities), and minimum solvency level limits. The research sample used purposive sampling technique. From the results of the purposive sampling technique, 7 insurance companies are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2018-2020 period. The results obtained from the assessment of the financial health of insurance companies using risk-based capital in 2018-2020 there are three companies that have very good risk-based capital values in the 2018-2020 period, namely ABDA, AMAG, and ASBI.*

**Keywords:** *financial health insurance, risk-based capital*

### I. Pendahuluan

Indonesia sudah banyak masyarakat yang menyadari adanya keuntungan pada asuransi dan menjadikan asuransi sebagai pilihan investasi yang aman. Terdapat banyak informasi mengenai produk asuransi yang mudah diperoleh melalui website sekuritas, platform media sosial, dan webinar. Namun dengan adanya kasus mengenai perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar klaim pada nasabahnya yang mengakibatkan beberapa perusahaan asuransi di Indonesia mengalami kepailitan. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya jumlah perusahaan asuransi di Indonesia.

Otoritas jasa keuangan mencatat penurunan jumlah perusahaan asuransi selama lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2016 sebanyak 146 perusahaan asuransi (Handayani, K., 2015). Tahun 2017 mencapai 152 perusahaan asuransi. Adapun tahun 2018 – 2019 mencapai 151 perusahaan asuransi. Di tahun 2020 menurun menjadi 139 perusahaan asuransi yang mendapat izin dari otoritas jasa keuangan (bps.go.id).

**Tabel 1. Rincian Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi di Indonesia Tahun 2016 - 2020**

Perusahaan Asuransi	Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi			
	2016	2017	2018 - 2019	2020
Asuransi Umum	80	7	7	7

		9	9	4
Asuransi Jiwa	55	6 1	6 0	5 4
Reasuransi	6	7	7	7
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2	2	2	3
Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	2
<b>Jumlah</b>	<b>146</b>	<b>152</b>	<b>151</b>	<b>139</b>

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 1 dipaparkan mengenai rincian dari jumlah perusahaan asuransi di Indonesia, mulai dari asuransi umum, asuransi jiwa, reasuransi, badan penyelenggara jaminan sosial, dan penyelenggara asuransi wajib. Dari tabel tersebut jumlah asuransi umum di Indonesia pada tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016-2020 jumlah dari perusahaan asuransi umum cenderung mengalami penurunan dengan total 80 perusahaan asuransi umum pada tahun 2016, 79 perusahaan asuransi umum dari tahun 2017-2019, dan pada tahun 2020 berjumlah 74 asuransi umum yang ada di Indonesia (Henrita, et., al., 2020).

Menurunnya jumlah perusahaan asuransi dari tahun ke tahun mengakibatkan perusahaan asuransi tidak mencapai adanya resiko yang timbul dari suatu kejadian, sehingga dari hal tersebut perusahaan wajib memiliki sistem pengelolaan manajemen keuangan yang baik. Perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat dan menyebabkan kebangkrutan disebabkan oleh berbagai resiko. Terdapat metode penilaian kesehatan keuangan dalam industri asuransi yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan asuransi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.53/PMK.010/2012 yaitu pengukuran nilai kesehatan pada perusahaan asuransi dengan menggunakan Risk based capital (RBC) yang timbul akibat deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi dapat berdampak pada timbulnya risiko keuangan yang besar, tetap juga memiliki peluang yang besar pula untuk menghasilkan laba yang tinggi.

Indonesia terdapat beberapa fenomena yang merujuk bahwa perusahaan tersebut belum mempertahankan risk based capital minimum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 53/PMK.010/2012. Risk based capital dalam perhitungan dapat ditinjau dari rasio solvabilitas perusahaan, dimana rasio tersebut juga memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Rasio ini tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan (Hery, 2016). Beberapa fenomena yang merujuk pada perusahaan yang belum konsisten mempertahankan risk based capital, diantaranya perusahaan Asuransi AJB Bumiputera yang mengalami gagal bayar klaim asuransi kepada nasabahnya, karena mismatch antara aset dan kewajiban sebab kewajiban lebih besar dibandingkan dengan aset. Perusahaan asuransi jiwa ini dengan RBC 3,04% dan mencatatkan kinerja keuangan minus Rp 20 triliun per Desember 2018. Disisi lain aset perusahaan hanya sebesar Rp 10,7 triliun. Sementara kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp 32,63 triliun (Kompas.com). Fenomena lain terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait produk investasi saving plan. PT Asuransi Jiwasraya memiliki nilai RBC hingga minus 850%.

PT Asuransi Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp 32 triliun untuk menyelamatkan perusahaan tersebut. Sedangkan nilai risk based capital perusahaan diluar peraturan otoritas

jasa keuangan (OJK) dimana modal minimum yang harus dipenuhi sebesar 120%, baik untuk asuransi umum maupun asuransi jiwa. Dari fenomena PT Asuransi Jiwasraya masalah kesehatan keuangan perusahaan berdampak pada gagal bayar klaim nasabahnya yang mencapai Rp 12,4 triliun. Fenomena terjadi PT Sampo Insurance Indonesia (Asuransi Sampo) mencetak kinerja keuangan yang stabil selama tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan keuangan teraudit laba perusahaan tercatat tumbuh sebesar 17% sepanjang tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, dan rasio solvabilitas atau Risk based capital (RBC) Asuransi Sampo per Desember 2020 tercatat mencapai minus 211% (teraudit), jauh di atas angka 120% yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (pasaRDana.id, 2021).

Berkaca dari lembaga asuransi di atas yang berkecimpung pada permasalahan yang sama akan mengurangi kepercayaan nasabah dan investor terhadap kinerja asuransi di Indonesia. Nasabah dan investor yang sadar akan pentingnya kondisi kesehatan keuangan perusahaan asuransi akan lebih jeli mengamati hal yang menjadi tolak ukur kesehatan perusahaan asuransi salah satunya rasio solvabilitas. Oleh sebab itu, banyaknya permasalahan yang menimpa perusahaan asuransi saat ini yang membuat peneliti mengambil judul dengan latar belakang yang dikemukakan yaitu penilaian Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Menggunakan Risk based capital (RBC) (Studi Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020).

## **II. Landasan Teori**

### **Kesehatan Keuangan**

Kesehatan keuangan merupakan pernyataan tertulis yang ditanda tangani perusahaan dan pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan untuk mengukur tingkat kebangkrutan perusahaan yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan operasional (Nurfadila, et., al., 2015). Mengukur tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan dapat menggunakan alat analisis yang disebut dengan analisis laporan keuangan.

### **Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi**

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 504/KMK/06/2004 tentang kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum bukan perseroan terbatas yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas paling sedikit 100%, jika belum memenuhi akan diberikan kesempatan melakukan penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas (Sapari, 2017).

### **Ukuran Kesehatan Keuangan Asuransi**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor.53/PMK.010/2012 ukuran menilai kesehatan pada perusahaan asuransi dengan menggunakan Risk based capital (RBC), dimana risk based capital menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor.63 Tahun 2004 bahwa Risk based capital adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dengan kerugian sebesar 120%, semakin besar rasio kesehatan risk based capital sebuah perusahaan asuransi, maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut (Setiawan, et., al., 2019).

### **Asuransi**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu (Yuliantoro, et., al., 2019).

### Risk-based capital

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2004 mengemukakan rasio kesehatan atau Risk based capital adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan financial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi dengan minimal rasio solvabilitas sebesar 120%, semakin besar rasio solvabilitas suatu perusahaan asuransi, semakin sehat kondisi financial perusahaan tersebut (Tampubolon, 2000). Keputusan menteri keuangan No.424/KMK.06/2004 menyebutkan rumus perhitungan Risk based capital sebagai berikut:

$$RBC = \frac{\text{Jumlah aset yang diperkenankan} - \text{jumlah kewajiban}}{\text{X100\% Batas Tingkat Solvabilitas Minimum}}$$

### III. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan indikator aset yang diperkenankan, kewajiban (liabilitas), dan batas tingkat solvabilitas minimum. Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari teknik purposive sampling didapatkan hasil 7 perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020.

### IV. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis aset yang diperkenankan (investasi dan non investasi) perusahaan asuransi periode 2018-2020 dengan menggunakan metode risk based capital terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Hasil Aset yang dipekenankan tahun 2018-2020**

Kode Perusahaan	Aset yang Diperkenankan (Rp)		
	2018	2019	2020
ABDA	2.502.266.000.000	2.798.789.000.000	2.420.503.000.000
AHAP	441.109.738.982	482.006.809.688	541.780.080.053
AMAG	3.232.014.000.000	3.579.352.000.000	4.560.038.000.000
ASBI	36.038.573.000	32.447.602.000	59.316.372.000
ASDM	1.047.059.976	1.144.843.770	846.938.625
ASRM	84.693.941.136	80.300.224.095	76.135.759.657
ASMI	1.868.000.000	2.044.000.000	5.667.000.000

Sumber: data diolah, 2022

Hasil analisis kewajiban (cadangan premi dan cadangan klaim) perusahaan asuransi periode 2018-2020 dengan menggunakan metode risk based capital terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Batas Tingkat Solvabilitas Minimum periode 2018-2020**

Kode Perusahaan	Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)		
	2018	2019	2020
<b>ABDA</b>	387,933,000,000	319,785,000,000	248,275,000,000
<b>AHAP</b>	40,378,730,000	38,130,430,000	46,623,798,828
<b>AMAG</b>	517,713,000,000	612,157,000,000	1,513,475,000,000
<b>ASBI</b>	27,196,294,000	28,483,374,000	57,711,855,000
<b>ASDM</b>	109,667,606	105,185,109	89,449,481
<b>ASRM</b>	3,195,678,224	4,117,136,797	3,489,749,982
<b>ASMI</b>	111,000,000	122,000,000	2,212,000,000

(Sumber: data diolah, 2022)

Hasil analisis kesehatan keuangan perusahaan asuransi periode 2018- 2020 dengan menggunakan metode risk-based capital terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi periode 2018-2020 Menggunakan Risk-Based Capital (RBC)**

Kode Perusahaan	Periode			Rata-rata %
	2018	2019	2020	
<b>ABDA</b>	317%	364%	532%	404%
<b>AHAP</b>	189%	128%	149%	155%
<b>AMAG</b>	307%	314%	587%	403%
<b>ASBI</b>	477%	578%	139%	398%
<b>ASDM</b>	281%	305%	379%	322%
<b>ASRM</b>	326%	194%	173%	231%
<b>ASMI</b>	370,71%	472,03%	120%	120%

Sumber: data diolah, 2022

Hasil analisis kesehatan keuangan perusahaan asuransi dilihat risk-based capital pada periode 2018-2019 kecenderungannya mengalami kenaikan, sedangkan periode 2020 mengalami penurunan. Didapatkan Hasil analisis Kesehatan keuangan perusahaan asuransi di BEI pada tahun 2018 dengan menggunakan risk-based capital berada pada kisaran 189% yang merupakan risk-based capital dari PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk (AHAP) hingga 477% yang merupakan risk-based capital dari PT Asuransi Bintang, Tbk (ASBI) dengan nilai rata-rata risk-based capital sebesar 324%. Tahun 2019 risk-based capital berada pada kisaran 128% yang merupakan dari PT Asuransi Harta Aman Pratama, Tbk (AHAP) hingga 578% yang



merupakan RBC dari PT Asuransi Bintang, Tbk (ASBI) dengan nilai rata-rata risk-based capital 336%. Pada tahun 2020 risk-based capital kisaran 120% dimana RBC dari PT Asuransi Maximus Graha Persada, Tbk (ASMI) hingga 587% yang merupakan risk-based capital dari PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk (AMAG) dengan rata-rata risk-based capital 297%.

Kesehatan keuangan perusahaan asuransi yang memiliki risk-based capital dalam kondisi sehat dari periode 2018-2020 yaitu perusahaan asuransi PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk (ABDA), dimana kondisi perusahaan PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk (ABDA) pada tahun 2018 membukukan total pendapatan Rp 648,27 miliar dengan kenaikan 0,62 % dari periode sebelumnya, pendapatan ini dari hasil investasi yang naik 29% menjadi Rp 81,61 miliar. Laba perusahaan mengalami pertumbuhan sebesar 3,54% menjadi Rp 69,11 miliar, dan aset yang dikelola mencapai Rp 2,50 triliun, kewajiban (liabilitas) perusahaan sebesar Rp1,57 triliun. Ditengah para perusahaan bisnis mengalami tekanan, ABDA mampu menumbuhkan kondisi keuangan di tahun 2019 tercatat pada laporan keuangan, laba mengalami pertumbuhan 19% menjadi Rp 85,21 miliar, aset yang dikelola perusahaan mencapai Rp 2,79 triliun meningkat tipis dari tahun sebelumnya sebesar 11%. RBC meningkat 13% dimana pada tahun 2018 sebesar 317% tumbuh menjadi 364% pada tahun 2019 (Kontan.co.id). Pada tahun 2020 hasil investasi relative stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, namun perusahaan masih mampu membukukan laba sebesar Rp 116,01 miliar naik sebesar 27%, dan kenaikan RBC sebesar 32% dari tahun sebelumnya menjadi 532%. Kendala utama yang dihadapi perusahaan mengenai persaingan yang cukup ketat, upaya untuk meningkatkan produksi di tengah daya beli konsumen yang cenderung tetap dibandingkan 2 tahun sebelumnya (investor.id).

**Tabel 5. Perusahaan Asuransi yang memiliki Risk based capital Baik**

No	Tahun	Peneliti	Kode Saham
1	2014	Johan Komdax, Sugeng Hariadi, dan Henrycus Winarto (2014)	ASPI, ASMREI, ASDM, ABDA
2	2015 - 2016	Wildan Dwi Hermawan (2017)	ABDA, AMAG, ASBI, ASRM
3	2017	Lili Sarce Joi Sapari (2017)	ABDA
4	2018 - 2020	Nurul Nabila Batin (2022)	ASBI, ASMI, ASRM, ABDA, AMAG

Sumber: data diolah, 2022

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa adanya konsistensi antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. ABDA memiliki nilai RBC yang baik atau tinggi pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. AMAG memiliki nilai RBC baik pada tahun 2015, 2016, 2019, dan 2020. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seorang tertanggung dalam memperoleh jaminan penggantian kerugian dari penyedia asuransi ketika terjadi risiko. Dapat diambil kesimpulan bahwa seorang tertanggung sebaiknya memilih perusahaan asuransi yang selalu memiliki RBC positif dan diatas nilai ketentuan minimal, dari data perusahaan di atas perusahaan asuransi PT Asuransi Bina Dana Arta, Tbk, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, dan PT Asuransi Bintang, Tbk yang

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang baik yang dapat menguntungkan tertanggung ketika menggunakan, membeli, dan investasi pada perusahaan asuransi.

Tertanggung atau investor juga sebaiknya tidak hanya melihat risk based capital dari suatu perusahaan asuransi saja, namun factor resiko lain juga dipertimbangkan yaitu risiko tidak sistematis dimana ada resiko bisnis, resiko likuiditas, resiko financial, dan lain sebagainya, karena meskipun umumnya hubungan risk adalah linier namun ada beberapa kondisi perusahaan yang menyebabkan hal tersebut tidak linier, jadi perlu juga untuk mencari banyak informasi tentang perusahaan asuransi yang akan digunakan.

## V. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian yang sedang dilakukan saat ini menyatakan bahwa semakin besar *risk-based capital* pada perusahaan asuransi maka semakin baik pula kesehatan keuangan pada perusahaan tersebut. Sebaliknya jika nilai risk-based capital nya dibawah nilai minimum maka posisi dari kesehatan keuangan perusahaan tersebut dalam kondisi tidak sehat. perusahaan yang memiliki nilai risk-based capital yang baik berturut-turut dari periode 2018-2020 diantaranya PT Asuransi Bina Dana Arta, TBK (ABDA). Tingkat kesehatan per masing-masing perusahaan asuransi pada periode 2018-2020 cukup bagus dimana risk based capital (RBC) dinilai minimal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.10.2012 pasal 2, namun perusahaan asuransi yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tetap harus dapat mempertahankan dan meningkatkan kesehatan perusahaan dengan memperhatikan risk based capital.

Investor atau calon investor perlu mengetahui *Risk-Based Capital* dari masing-masing perusahaan asuransi yang listing pada Bursa Efek Indonesia agar mengetahui mana perusahaan asuransi yang dalam kondisi sehat atau tidak sehat dari segi keuangannya. Bagi peneliti selanjutnya, bahwasanya peneliti dapat mengambil jarak waktu atau periode data terbaru dengan menggunakan metode risk based capital atau peneliti dapat menggunakan periode waktu yang sama dengan metode yang berbeda untuk mengetahui kesehatan keuangan perusahaan asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, K. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Asuransi yang Go Publik (Menggunakan Analisis Rasio dan Risk based capital). Laporan Lembaga Keuangan perusahaan Asuransi.
- Henrita, D. C., dan Atahau, A. D. R. (2020). Aplikasi Risk based capital dan rasio Keuangan dalam Penilaian Tingkat Kesehatan PT Asuransi Jiwasraya (Studi Kasus pada Periode sebelum Kebangkrutan). Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 13(1), 125-133.
- Nurfadila, S., Hidayat, R. R., & Sulasmiyati, S. (2015). Analisis rasio keuangan dan risk based capital untuk menilai kinerja keuangan perusahaan asuransi (Studi pada PT. asuransi Indonesia (Persero) Periode 2011-2013). Brawijaya University.
- Sapari, L. S. J. (2017). Analisis rasio keuangan dan risk based capital pada PT. Asuransi Bina Dana Arta, Tbk. Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, 8(1), 15-32.
- Setiawan, A., Irawan, T., & Sasongko, H. (2019). KARAKTERISTIK KESEHATAN PERUSAHAAN DI INDUSTRI ASURANSI UMUM INDONESIA. JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi), 135-150.

- Tampubolon, R. (2000). Perhitungan tingkat solvabilitas dengan metode risk-based capital (studikusus pada asuransi internasional Indonesia). Thesis. Universitas Indonesia.
- Yuliantoro, H. R., Yefni, Y., & Apreza, L. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan keuangan Terhadap Pendapatan Premi Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 12(1), 19-28.

## Koordinasi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo, Kota Surabaya

Intan Priska Wardani<sup>1</sup>, Sasmito Jati Utama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik,  
Universitas Hang Tuah, Indonesia

\*Corresponding author: sasmitomojopahit9@gmail.com

### Abstract

*The Cash Social Assistance (Bantuan Sosial Tunai/BST) is an assistance program from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is given to vulnerable and poor communities who are affected by the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to analyze in depth the coordination of government agencies in Wonokusumo Village, Semampir District, Surabaya City. This study uses the theory of James Thompson. There are 3 types of coordination: unified interdependence; sequential interdependence; reciprocal interdependence with aspects of identification of the parties involved and the participating as well as the availability of implementation instructions and technical guidelines. The study used a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the coordination of the parties: PT. Post Indonesia, Social Service, and Kelurahan already implemented. Three aspects the coordination of cash social assistance programs in Wonokusumo Village, Semampir, Surabaya has been going well. The specified standard procedure for supporting factors such as responsive agency resources as well as optimal community involvement for the inhibiting factor in this study, and the quantity of village resources is proportional to the large number of local residents. This research suggest to increase the role of Wonokusumo village human resources, this is holding training according to their fields and also increasing the level of their education as community service.*

**Keywords:** Cash Social Assistance, Coordination, Wonokusumo.

### I. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan kondisi keterbatasan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup yang ditandai rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, masalah kemiskinan selalu menarik perhatian hal tersebut disebabkan karena kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi kemiskinan menyebabkan terciptanya masalah sosial ditengah masyarakat. Amartya Sen (1987) dalam Haughton dan Shahidur (2012) menjelaskan kemiskinan berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Kemiskinan terjadi apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan dan tidak mendapatkan pendidikan serta kondisi kesehatan yang buruk selain itu kemiskinan dianggap sebagai fenomena multidimensional yang termasuk dalam salah satu masalah dari kesejahteraan sosial. Tujuan nasional Negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah dalam Undang- Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan umum. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam hal ini seluruh warga

memiliki pekerjaan yang layak karena pekerjaan merupakan sumber pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kemunculan wabah virus jenis baru pada tanggal 2 Maret 2020 terdeteksi di Indonesia yaitu Corona Virus Disease 2019 dengan penyebaran yang sangat cepat yang berdampak negatif pada semua sektor mulai dari sektor kesehatan, sektor sosial ekonomi, hingga sektor politik. Dampak munculnya pandemi ini menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat dikarenakan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dan sejahtera dengan menitikberatkan pada pembangunan struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta percepatan pembangunan diberbagai bidang. Sejalannya permasalahan tersebut pemerintah melalui Kementerian Sosial yang selanjutnya ditulis kemensos merespon dengan memberikan berbagai program kebijakan bantuan sosial bagi keluarga miskin yang berkurangnya pendapatan hingga kehilangan pekerjaan sehingga mengalami sulit dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Program kebijakan bantuan sosial oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai dasar peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 yang berisi “Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS- NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa elemen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan”. Tujuan SIKS-NG memberikan informasi dengan jelas dan lengkap sehingga mempermudah masyarakat untuk verifikasi penerima bantuan sosial dengan data terkini seluruh program perlindungan sosial secara nasional selain itu juga memudahkan pegawai untuk melakukan verifikasi ketika melakukan kunjungan ke Keluarga Penerima Manfaat.

Kota Surabaya menduduki peringkat kota terbesar kedua namun pemerintah belum memperhitungkan angka kemiskinan di kota ini, permasalahan kemiskinan dapat menimbulkan masalah yang kompleks seperti pengangguran, pola asuh anak, kesehatan, kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Beberapa program bantuan sosial yang telah diuraikan penulis memfokuskan penelitian pada Program BST merupakan bantuan sosial yang diberikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat akan memenuhi kebutuhan dasar. Program BST memiliki latar belakang bukan hanya permasalahan kemiskinan, namun penyebabnya dari dampak selama pandemi hal itu disebabkan terutama disektor ekonomi.

Mengutip dari *policy paper* (naskah kebijakan) dengan judul modernisasi *Government to Person* (G2P) melalui solusi financial technology (FINTECH) di Indonesia hasil kerjasama tim penyusun naskah kebijakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Asosiasi FINTECH INDONESIA (AFTECH) dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang menjelaskan salah satu kendala yang sering ditemui dalam skema bantuan sosial salah satunya ialah ketidaktepatan keluarga penerima manfaat hal tersebut dipertegas dalam pola penyaluran bantuan program GSP Non-Perbankan “Hingga tahun 2016 beberapa program G2P yaitu PKH, ASPDB, dan ASLUT, menggunakan metode penyaluran tunai melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah secara umum, penyaluran bantuan dilakukan sesuai prosedur teknis program-program bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial yakni sejumlah dana bantuan yang ditransferkan oleh kuasa bendahara umum negara (KPPN) ke rekening lembaga penyalur yaitu PT. Pos Indonesia dan kemudian ditransfer ke rekening giro penerima bantuan yang dibuatkan lembaga penyalur

atas nama Direktorat Penanggung Jawab di Kementerian Sosial. Khusus untuk penyaluran PKH, pemerintah pusat dan daerah bersama dengan PT. Pos Indonesia melakukan verifikasi data yang cukup panjang.

Prosedur verifikasi melalui beberapa instansi meningkatkan potensi penyalahgunaan dana atau wewenang (korupsi) serta ketidaktepatan penerima manfaat PKH.” Bentuk bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah meliputi beberapa program diantaranya: a) Program Keluarga Harapan, bantuan berupa uang tunai dan sembako yang disalurkan setiap bulan ke rekening KPM melalui e-warong/agen bank, dapat diambil menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) program ini ditujukan kepada ibu hamil, bayi, siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, siswa sekolah menengah atas, disabilitas hingga lanjut usia. Besaran bantuan Program Keluarga Harapan disesuaikan dengan anggota keluarga penerima manfaat; b) Program Kartu Sembako, Bantuan sosial dengan nama lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disalurkan secara non tunai dengan nilai Rp.150.000, setiap bulan yang disalurkan melalui mekanisme uang elektronik. Kartu sembako dapat digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan sembako di e-warong dan tidak dapat ditukarkan secara tunai; c) Bantuan Sosial Tunai, bantuan berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat darurat terdampak COVID-19 berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian sosial dengan mekanisme penyaluran oleh PT. Pos Indonesia. Bantuan ini dikhususkan bagi KPM yang tidak tercantum pada program bantuan sosial lainnya dengan besaran nilai Rp. 300.000 setiap bulannya.

Lebih lanjut program selanjutnya yaitu d) Program Kartu Prakerja, bantuan ini tertuju kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan atau terdampak PHK. Pemerintah memberikan bantuan pelatihan yang dapat digunakan dalam kehidupan pekerjaan nantinya. Bantuan dapat diterima setelah lolos saat melakukan pendaftaran secara online selain itu juga mendapatkan bantuan Rp. 600.000 selama 4 bulan; e) Bantuan Beras, Bantuan beras sebesar 5 kg yang disalurkan oleh Kementerian Sosial dengan bermitra bersama Perum Bulog kepada pekerja sosial sektor informal Jawa-Bali yang tidak optimal mendapatkan penghasilan akibat kebijakan pembatasan kegiatan. Bantuan ini khusus mereka yang tidak termasuk mendapat bantuan PKH, BST, BPNT. Kota Surabaya menduduki peringkat kota terbesar kedua namun pemerintah belum memperhitungkan angka kemiskinan di kotaini, permasalahan kemiskinan dapat menimbulkan masalah yang kompleks seperti pengangguran, pola asuh anak, kesehatan, kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

Beberapa program bantuan sosial yang telah diuraikan penulis memfokuskan penelitian pada Program BST merupakan bantuan sosial yang diberikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat akan memenuhi kebutuhan dasar. Program BST memiliki latar belakang bukan hanya permasalahan kemiskinan, namun penyebabnya dari dampak selama pandemi hal itu disebabkan terutama disektor ekonomi. Keputusan Menteri Sosial mor54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 dikeluarkan atas dasar peran serta, sejalan dengan pelaksanaan Program BST di Kota Surabaya dalam berita media masa dari JawaPos.com dalam penyaluran, memang ada sejumlah kendala misalnya, salah eja pada nama hal tersebut di paparkan oleh Ibu Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial. Dalam penyaluran bantuan yang melalui perbankan, hal seperti itu bisa bermasalah. Risma mencontohkan, ada warga yang namanya beda satu huruf atau nama gandeng sehingga bantuan bakal nyantol (sumber:<https://www.jawapos.com/> diakses pada tanggal 25 Mei 2022).

Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Surabaya juga mendorong Dinas Sosial Kota Surabaya untuk memastikan nasib warga MBR yang tahun lalu mendapat bantuan namun sekarang

tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Jika dari tiga skema bantaun Kemensos ini warga yang sudah masuk data MBR tidak mendapat bantuan apapun harus ada solusi. Reni meminta Pemerintah Kota segera menyiapkan skema bantuan lain sambil mengusulkan ke Kemensos agar semua yang masuk data MBR juga masuk DTKS.

Program BST di Kota Surabaya dalam pelaksanaan atau implementasinya berdasarkan data dari kantor Dinas Sosial Surabaya menysasar 172.871 keluarga penerima manfaat dari jumlah total 31 Kecamatan dan 155 Kelurahan di Kota Surabaya. Berikut data jumlah Keluarga Penerima Manfaat BST seluruh Kecamatan Kota Surabaya di Kota Surabaya Tahun 2020-2021 dengan jumlah penerima terbanyak berdasarkan data dari Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu pada Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir dengan total 4849 KPM dan jumlah penduduk terbanyak sebesar 70.447 jiwa. Adapun kendala dalam pelaksanaan penyaluran Program BST di Kota Surabaya yaitu pada permasalahan dana terhambat penyaluran karena KPM yang sudah meninggal, KPM berpindah alamat atau luar kota, KPM sudah mendapat bantuan sosial program lain seperti PKH dan BPNT, KPM menolak dengan batas waktu yang sudah ditentukan Kementerian Sosial telah terlampaui sehingga dana BST akan dikembalikan ke Pemerintah Pusat.

Berdasarkan penjabaran penulisan mengenai bantuan sosial penelitian dengan judul “Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya” peneliti dapat merumuskan masalah yakni Bagaimana Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan apa saja faktor pendukung dan penghambat atas pelaksanaan program tersebut dengan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisa secara mendalam bentuk koordinasi dalam pelaksanaan program BST di Kota Surabaya.

## II. Landasan Teori

Kata koordinasi dalam bahasa Inggris secara etimologis *coordination* yang artinya kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan segala hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Konsep koordinasi adalah suatu tindakan menyusun unsur-unsur yang sangat kompleks sehingga semuanya dapat terintegrasi dan bekerja sama secara efektif dan harmonis. Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.” Kencana (2011) mengartikan koordinasi sebagai suatu kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Sebelum melaksanakan penelitian ini terlebih dahulu, penulis melakukan tinjauan dan menemukan beberapa referensi terdahulu yang terkait dengan focus yang sama dengan permasalahan yang diteliti, yang pertama Dwi Safitri, Moh. Taufik Hidayat, dan Moh. Sutarjo (2018) dengan judul “Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Desa dalam Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBTLH) di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, yang kedua, Deasy Ariyanto (2018) dengan judul “Koordinasi Kelembagaan dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah”, yang ketiga Regynald Prasatya Tampake, Ronny Gosal dan Welly Waworundeng (2019) dengan judul “Koordinasi Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kecamatan Malalayang Kota Manado)”, yang keempat Arief Rachman Hakim dan



Fernandes Simangunsong (2021) dengan judul “Koordinasi Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya penulisan disingkat BLT-DD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan” yang kelima Khusnul Khothimah, Diana Hertati (2021) dengan judul “Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai.

### III. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang mana menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh Lexy J. Moleong (2007:3) menjelaskan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari instrumen penelitian dan perilaku yang sedang diamati. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dasar penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya menggunakan teori dari James D. Thompson dengan 3 aspek saling ketergantungan menyatu, saling ketergantungan berurutan dan saling ketergantungan timbal balik.

### IV. Hasil dan Pembahasan

Program Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program yang pemberian bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada KPM sebagai kompensasi pandemi COVID-19. Di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang memiliki jumlah penduduk terpadat yakni 70.447 jiwa dengan jumlah penerima Bantuan Sosial Tunai tertinggi se Kota Surabaya sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya 2020-2021**

Kelurahan	Jumlah
Ampel	1173
Pegirian	2658
Sidotopo	2273
Ujung	2177
Wonokusumo	4849
<b>Total</b>	<b>13130</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022*

Adanya Program BST merupakan langkah yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai peran pelayanan bagi masyarakat melalui instansi daerah terkait. Anggaran dana Program BST berasal dari APBN 2020 adapun data penerima berasal dari DTKS juga dapat berasal dari usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Analisis koordinasi peneliti mendapatkan hasil terkait aspek pada teori yang dipilih sebagai berikut:

#### Identifikasi Pihak Terlibat dan Berperan dalam Pelaksanaan Program BST

Telah diketahui masing-masing pihak instansi yang terlibat dan berperan memiliki peran dan tugas yang mendukung memaksimalkan kinerja demi membantu kelancaran dalam menjalankan suatu kebijakan pelaksanaan Program BST hingga tercapai keluarga penerima manfaat yang tepat sasaran. Tanggungjawab dan tugas kerjasama antar instansi pihak yang

terlibat juga memerlukan koordinasi sebagai upaya mengarahkan memberikan jumlah dan waktu serta mengarahkan pelaksanaan untuk dapat mewujudkan suatu tindakan yang selaras. Disini peran Dinas Sosial sebagai lembaga yang bertanggungjawab dibidang masalah kesejahteraan sosial sangat penting keterlibatan dan upaya yang dilakukan secara maksimal dalam memaksimalkan program Kementrian Sosial ini berjalan.

#### **Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program BST**

Diketahui dijelaskan regulasi dasar yang mengatur pelaksanaan Program BST ada didalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019. Hal tersebut lebih mengerucut kembali pelaksanaan Program BST juga diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada bab memutuskan poin ketujuh yang menjelaskan data keluarga penerima manfaat berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang diusulkan melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan melampirkan surat pertanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data KPM.

Khususnya di Kota Surabaya tidak adanya aturan spesifik mengenai program BST, data usulan penerima dapat diusulkan melalui MBR Kota Surabaya dengan verifikasi dan validasi oleh RT/RW kemudian Kelurahan setempat untuk dapat dikatakan layak MBR sebelum diajukan kepada Dinas Sosial untuk survey. Jika memang diputuskan layak menjadi MBR Kota Surabaya dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak mengenai data masyarakat terdampak pandemi COVID-19 data akan di kirimkan melalui website SIKS-NG untuk dilanjutkan ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementrian Sosial untuk mendapatkan Program BST.

#### **Koordinasi Pelaksanaan Program BST Saling Ketergantungan Menyatu**

Interaksi hubungan ketergantungan menyatu antar instansi kecamatan satu dengan kecamatan lainnya hingga kelurahan satu dengan kelurahan lainnya tidak saling terkait namun dalam pelaksanaannya mengenai laporan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang diterima dari pihak instansi sebelumnya untuk proses pendataan Keluarga Penerima Manfaat tidak diperlukannya verifikasi dan sinkronisasi instansi satu sama lain:

- a) Saling Ketergantungan Berurutan: adanya hubungan saling keterkaitan secara berurutan pada Kemensos sebagai pelaksana Program BST bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia sebagai pihak penyalur, Kemensos memberikan data KPM dan harus bisa bekerja lebih dahulu sebelum pihak yang lain bekerja untuk hasil akhir yang tercapai sasaran. PT. Pos Indonesia Regional Surabaya adalah Kantor Pos Kebonrojo. Program BST bersifat top down berjenjang sesuai peranan tugas pokok fungsi Kantor Pos, Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. Dimulai dari proses penerimaan data, proses mencetak undangan KPM, proses sosialisasi, proses penyaluran undangan ke Kecamatan hingga tersampaikan ke warga penerima yang dibantu koordinasi RT/RW sampai proses pembayaran dana bantuan sesuai jadwal yang ditentukan.
- b) Saling Ketergantungan Timbal Balik: adanya hubungan keterkaitan secara timbal balik adanya hubungan saling memberi dan menerima satuan organisasi pihak yang berperan atas masing-masing tanggungjawab tugas fungsi yang dijalankan menghubungkan kembali tugas yang berkaitan dalam hal ini proses penyaluran dana oleh tim penyalur Kantor Pos akan mendata ulang mengenai data yang tak tersampaikan ke sasaran hal itu ditinjau kembali wilayah Kelurahan untuk disampaikan ke Dinas Sosial Kota Surabaya

untuk melakukan sinkronisasi data yang ada, dari Dinas Sosial melakukan komunikasi kepada Kecamatan terkait untuk melaporkan informasi terjadinya gagal penyaluran dana kepada Kelurahan setempat. Pihak Kelurahan dibantu oleh stakeholder RT/RW untuk mendata kembali warganya dan melaporkan secepatnya ke Kelurahan.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program BST**

Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program BST di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Wonokusumo dapat disimpulkan bahwa terjadi dukungan dalam pelaksanaan program dari faktor internal dan eksternal adapun faktor internal meliputi koordinasi peranan pihak yang terlibat dalam hal ini Ka Sie dengan Staff Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Wonokusumo telah berkoordinasi dengan baik dalam hal menyampaikan informasi kepada KPM dengan alur dan jadwal penyaluran Program BST yang diberikan. Kesiapan koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

Selain itu pada faktor eksternal terdapat kerjasama ketua RT/RW setempat dalam hal membantu pihak Kelurahan sebagai perantara informasi kepada warganya dan menyampaikan terkait pelaksanaan program BST yang diberikan oleh Kementerian Sosial yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program BST juga terdapat pada internal yaitu kuantitas SDM Kelurahan Wonokusumo hanya 5 orang untuk bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian berbanding dengan jumlah angka penduduk dan data MBR Kelurahan Wonokusumo yang mencapai 40.000 keluarga sangat menghambat kinerja pegawai dalam hal pelayanan bantuan.

### **V. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data pembahasan mengenai Analisis Koordinasi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dapat menarik kesimpulan bahwa:

Identifikasi peranan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya sudah diketahui siapa saja yang dan bagaimana tugas fungsinya untuk Dinas Sosial dibawah peranan bidang Kesejahteraan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin, Kecamatan dan Kelurahan dibawah peranan bidang Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian. Peran antar satuan organisasi pemerintah saling berjalan berjenjang top down dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial hingga tingkat kecil unit RT/RW.

Aspek analisis koordinasi terdapat tiga tipe saling ketergantungan dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dapat dianalisis menggunakan semua jenis koordinasi yaitu saling ketergantungan menyatu dalam hal data penerima yaitu antara Kantor Pos dengan Kecamatan kemudian Kecamatan dengan Kelurahan namun hal ini antara kecamatan satu dengan kecamatan lainnya dan kelurahan satu dengan kelurahan lainnya tidak saling terkait. Saling ketergantungan berurutan dalam hal dari proses penerimaan data, proses mencetak undangan KPM, proses sosialisasi, proses penyaluran undangan ke Kecamatan hingga tersampaikan ke warga penerima yang dibantu koordinasi RT/RW sampai proses pembayaran dana bantuan sesuai jadwal yang ditentukan yaitu antara Kantor Pos dengan Kecamatan kemudian Kecamatan dengan Kelurahan kemudian Kelurahan dengan RT/RW. Saling ketergantungan timbal balik. Hal tersebut dibuktikan oleh pemetaan tugas pokok dan fungsi

peranan pihak yang terlibat. Saling ketergantungan timbal balik dalam hal penyampaian data gagal bayar penerima yaitu oleh Kantor Pos dengan Dinas Sosial kemudian Dinas Sosial dengan Kecamatan kemudian Kecamatan dengan Kelurahan dan Kelurahan dengan RT/RW.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat ditemukan pada lingkungan internal dan eksternal dari instansi Pemerintah Kota juga keterlibatan peran RT/RW hingga masyarakat penerima. Pelaksanaan Program BST di Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir sudah berhasil 80% banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah membuat angka kemiskinan di Kelurahan ini tergolong sangat tinggi. Bantuan yang diberikan bersifat sementara dan mendesak yang tidak bisa menghilangkan angka kemiskinan secara menyeluruh namun program bantuan ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari masyarakat penerima.

### Saran

- 1) Penulis menyarankan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota untuk dapat melakukan validasi dan verifikasi data kembali guna sinkronisasi meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial.
- 2) Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi tentang kebijakan bantuan sosial tunai ini secara jelas dengan dasar hukum peraturan yang ada kriteria syarat mutlak yang digunakan sebagai calon KPM agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman pola pikir masyarakat atas bantuan yang diterima berbeda.
- 3) Penulis menyarankan untuk meningkatkan peran SDM Kelurahan Wonokusumo yang lebih baik yaitu dengan mengadakan pelatihan sesuai bidang dan juga meningkatkan jenjang pendidikan setingkat D3 hingga Sarjana sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Budi Susilowati. 2014. Apa dan Mengapa Harus Koordinasi. Jakarta: Kemenkeu, Inform database: [https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/p\\_usdiklat-pengembangan-sumber-daya-manusia-apa-dan-mengapa-harus-koordinasi](https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/p_usdiklat-pengembangan-sumber-daya-manusia-apa-dan-mengapa-harus-koordinasi)
- Deasy Ariyanto. (2018) "Koordinasi Kelembagaan dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah." *Journal of management Review*. Volume 2. No. 1 Page (161-171). ISSN-P: 2580-4138. ISSN-E 2579-812X.
- Ferdiyan Pratama. 2020. Solusi Hadapi permasalahan Sosial. Jakarta: Puspensos, Inform database: <https://puspensos.kemensos.go.id/solusi-hadapi-permasalahan-sosial-bantuan-sosial-tunai-bansos-tunai>
- Hanum, A. E. (2021). Melalui Program Membaca Menyenangkan. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9.
- Hakim, Arief Rachman, Fernandes Simangunsong, Institut Pemerintahan, and Dalam Negeri. 2021. "Koordinasi Pemerintah Dalam Pemberian Bantuan Langsung Tunai Koordinasi Pemerintah Dalam Pemberian BantuanLangsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan." (July). doi: 10.32669/village.
- Hasibuan, H. Malayu S. .. 2006. Manajemen : Dasar, Pengertian, Dan Masalah. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kencana, Syafiie Inu. 2015. Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Moleong, Lexi J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Safitri, Dwi, Moh. Taufik Hidayat, and Moh. Sutarjo. 2018. "Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin Dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Dan Desa Dalam Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni Di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon."
- Khusnul Khothimah, Diana Hertati (2021) "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai." Jurnal Governansi. Volume 7 No. 2 Tahun 2021. p-ISSN 2549-7138.
- Jatim Newsroom. 2017. Kadinsos Jatim: Ada 4 Program Bansos dari Pemprov Jatim. Inform database: <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kadinsos-jatim-ada-4-program-bansos-dari-pemprov-jatim>
- Robertus Rizky. 2021. PT. Pos Indonesia Percepat Distribusi BST Selama PPKM Darurat. Surabaya. Inform database: <https://www.jawapos.com/surabaya/21/07/21/pt-pos-indonesia-percepat-distribusi-bst-selama-ppkm-darurat>

## Pengaruh *Downward Communication* dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Pengembangan Outlet Kantor Pos Cabang Utama Surabaya

Galuh Noviani<sup>1\*</sup>, Sri Umiyati<sup>2</sup>, Setya Prihatiningtyas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Bisnis,  
Universitas Hang Tuah, Indonesia

\*Corresponding author: galuh.noviani66@gmail.com

### Abstract

*This study is conducted to determine (1) the effect of Downward Communication on job satisfaction of the main branch post office Surabaya 60000, (2) the effect of compensation on job satisfaction of the employees of the Surabaya main branch post office 60000, (3) the effect of Downward Communication and Compensation on job satisfaction employees of the main branch post office Surabaya 60000. The sample uses 52 employees. This research includes causal associative research using a quantitative approach, namely validity test, reliability test, classical assumption test, multiple regression, t statistic test, F statistic test, and coefficient of determination (R<sup>2</sup>). It is proven through the F test, F count 3,18 > F table 704,470 and a significant value of 0,000 < 0,05 it can be concluded that Downward Communication (X1) and Compensation (X2) have a positive and significant effect on employee job satisfaction (Y) simultaneously and the coefficient of determination 3,4%.*

**Keywords:** downward communication, compensation, employee job satisfaction

### I. Pendahuluan

Setiap Perusahaan pada umumnya pasti memiliki tujuan yang jelas, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan memanfaatkan berbagai faktor produksi yang dimilikinya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan kemampuan. Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya akan selalu berhadapan dengan manusia sebagai sumber daya yang dinamis dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang.

*Downward Communication* adalah pimpinan yang menunjukkan arus pesan mengalir dari atasan atau para pimpinan kepada bawahannya (Ritonga, 2019). Komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan dan kebijaksanaan umum. Menurut Pace (2013) *Downward Communication* yang biasa disebut dengan komunikasi kebawah dalam sebuah organisasi berarti informasi mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah.

Menurut Werther dan Davis (2007) kompensasi adalah sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran dan kontribusinya kepada organisasi. selanjutnya didalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai baik berupa uang atau bukan uang sebagai tanda balas jasa yang diberikan bagi kontribusi pegawai yang diberikannya

untuk organisasi. pengelolaan kompensasi juga merupakan kegiatan yang penting Gaol (2014). Kompensasi disebut sebagai sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerjanya Sunyoto (2015).

Kepuasan Kerja merupakan salah satu bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Kepuasan kerja adalah derajat positif atau negatif perasaan seseorang mengenai berbagai tugas-tugas pekerjaan, tempat kerja dan hubungan sesama pekerja (Wibowo, 2012). Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil berjudul pengaruh *downward communication* dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan bagian pengembangan outlet kantor pos cabang utama Surabaya.

## II. Landasan Teori

### Penulisan Downward Communication

*Downward Communication* adalah Komunikasi atasan kebawahan yang menunjukkan arus pesan yang mengalir dari para atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Menurut Muhammad Arnie (2017) *Downward Communication* adalah pimpinan yang menunjukkan arus pesan mengalir dari atasan atau para pimpinan kepada bawahannya. Komunikasi ke bawah digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan. Pesan tersebut biasanya berhubungan dengan pengarahan, tujuan, disiplin, perintah, pertanyaan dan kebijaksanaan umum.

### Kompensasi

Menurut Werther dan Davis (2007) kompensasi adalah sebagai apa yang diterima pekerja sebagai tukaran dan kontribusinya kepada organisasi. selanjutnya didalam kompensasi terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pegawai baik berupa uang atau bukan uang sebagai tanda balas jasa yang diberikan bagi kontribusi pegawai yang diberikannya untuk organisasi.

### Kepuasan Kerja Karyawan

Kepuasan Kerja merupakan salah satu bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, situasi kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Kepuasan kerja adalah derajat positif atau negatif perasaan seseorang mengenai berbagai tugas-tugas pekerjaan, tempat kerja dan hubungan sesama pekerja (Wibowo, 2012). Dengan hipotesis sebagai berikut:

H1: Ada Hubungan Pengaruh Downward Communication (X1) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y)

H2: Ada Hubungan Pengaruh Kompensasi (X2) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y)

H3: Ada Hubungan Pengaruh Downward Communication (X1) dan kompensasi (X2) terhadap kepuasan kerja karyawan (Y)

## III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Pada Bagian Pengembangan Outlet yang berjumlah 52 karyawan Kantor Pos Cabang Utama Surabaya 60000. Jenis uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



- 1) Uji normalitas untuk mengetahui kenormalan distribusi data dapat juga menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test melalui program SPSS, apabila nilai Asymp.Sig. suatu variabel lebih besar dari level of signifikan 5% atau  $>0,050$  maka variabel tersebut terdistribusi normal jika nilai Asymp.Sig suatu variabel lebih kecil dari level of signifikan 5% atau  $<0,050$  maka variabel tersebut tidak terdistribusi dengan normal.
- 2) Uji Multikolinieritas digunakan jika nilai Variance Inflation Faktor (VIF) kurang dari 10 itu menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinieritas yang berarti tidak terdapat hubungan antara variabel bebas.
- 3) Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Pada uji heteroskedastisitas ini jika terdapat pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu artinya mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.
- 4) Analisis regresi linier berganda adalah suatu persamaan yang menggambarkan pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

a = Konstanta

X1= Downward Communication

X2= Kompensasi

Y = Kepuasan Kerja Karyawan

b1 b2= Koefisien regresi linier berganda

e = standart error

- 5) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sendiri. Jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 6) Uji F adalah uji semua variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- 7) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dipergunakan untuk mengukur seberapa dalam kemampuan model regresi ini dapat menjelaskan variasi dari variabel bebas. Nilai dari  $R^2$  itu sendiri adalah 0 dan 1.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

**Tabel 1 Hasil Uji Parsial (t)**

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig
X1	4,178	2,009	,000
X2	15,647	2,009	,000

*Sumber : Data Primer diolah (2022)*

Hasil perhitungan t tabel =  $(\alpha/2; n-k-1)$

=  $(0,05/2 ; 52 -2 -1)$

=  $(0,025 ; 49)$

t tabel = 2,009575

### Uji Simultan F

Menurut Sanusi (2011) pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen.

**Tabel 2. Hasil Uji Simultan (F)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	654,470	2	327,235	704,470	,000 <sup>b</sup>
Residual	22,761	49	465		
Total	677,231	51			

a. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Karyawan

b. Predictors: (Constant), Kompensasi, Downward Communication

Sumber: Data Diolah (2022)

Dapat diketahui F tabel = F (k; n-k)

= F(2 ; 52 -2)

= F(2 ; 50)

F tabel = 3,18.

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.16 dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung yang didapat yaitu sebesar 704,470 dan nilai F tabel yaitu sebesar 3,18 bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai f tabel dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan bahwa variabel Downward Communication dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja karyawan.

### Koefisien Korelasi Berganda ( $R^2$ )

**Tabel 3 Koefisien Korelasi Berganda**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,983 <sup>a</sup>	,966	,965	,68155

a. Predictors: (Constant), Kompensasi, Downward Communication

b. Dependent Variable: Kepuasan Kerja Karyawan

Berdasarkan pada data 4.17 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi pada penelitian ini adalah sebesar 0,966 yang berarti bahwa variabel Downward Communication dan kompensasi dapat menjelaskan variabel kepuasan kerja karyawan sebesar 96,6% sedangkan untuk sisanya ( $100\% - 96,6\% = 3,4\%$ ) di pengaruhi oleh faktor-faktor variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

1) Pengaruh Variabel Downward Communication terhadap Kepuasan kerja Karyawan

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yang didapat yaitu 4,178 dan nilai t tabel 2,009 dengan  $df = 49$  dan hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Downward Communication terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.

2) Pengaruh Variabel Kompensasi terhadap Kepuasan kerja Karyawan

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung yang didapat yaitu 15,647 dan nilai t tabel 2,009 dengan  $df = 49$  dan hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel kompensasi terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.

## V. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil uji secara parsial menunjukkan bahwa variabel *Downward Communication* ( $X_1$ ) dan variabel kompensasi ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja karyawan ( $Y$ ). Dari hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa variabel *Downward Communication* ( $X_1$ ) dan variabel kompensasi ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja karyawan ( $Y$ ). Hasil penelitian ini diharapkan kepada atasan Kantor Pos Cabang Utama Surabaya 60000 untuk tetap melakukan komunikasi atasan kebawahan seacara langsung untuk menjaga komunikasi antara atasan dan bawahan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak variabel atau pengguna variabel lain agar hasil penelitian mengenai Downward Communication dan kompensasi dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik dari pada penelitian sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Akhwanul, and Ihda Tamini, 'Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja', 04 (2015), 59–68
- Anwar, S, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2007)
- Arina, Ferry, *Pengaruh Kompensasi, Motivasi dan Pengawasan terhadap Semangat Kerja Karyawan* (Pekanbaru :PT. Riau Media Grafika : Jom Fekon Vol 2 No 1.h i-15, 2015)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : PT. Adi Mahasatya, 2002)
- Bangun, W., *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : Erlangga,2012)
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian : Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya* (Jakarta : Predana Media, 2005)
- Cahyadi Putra, D., and Ni Mujiati, 'Pengaruh Komunikasi, Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di Pt Bpr Nusamba Mengwi', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 4.5 (2015), 255037
- Davis, Keith& John W Newstrom, *Perilaku Dalam Organisasi*, Alih Bahas (Jakarta: Erlangga,

2004)

Gaol, J, A to Z Human Capital Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : Grasindo, 2014)

Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Edisi 2 (Yogyakarta: BPFE, 2013)

Hairudin, A, 'Pengaruh Kompensasi Dan Komunikasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pabrik Pada PT. Agro Sarimas Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir', *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, IX.1 (2016), 620–33

Hasibuan, M, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi* (Penerbit Bumi Aksara, 2017)

Ritonga, E. Y. (2019). *Revisi Diktat KOMUNIKASI ORGANISASI*. 1–135.

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2013)

Sunyoto, D. *Penelitian Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (2015).

Werther, William B., and Keith Davis., *Human Resources and Personal Management* (2007).